

Buletin La'ó Hamutuk

Vol. 3, No. 7

Oktober 2002

Bantuan bilateral dari negara-negara donor tetap memegang peranan yang sangat penting bagi Timor Lorosa'e, dan bantuan itu tidak selalu membantu seperti pengakuan mereka. Dalam edisi kali ini, kami menyoroti **kontribusi Portugal** dan pengaruhnya terhadap pendidikan dan pilihan bahasa di sini. Kami juga meninjau kembali **Program Pemberdayaan Masyarakat (CEP)** Bank Dunia untuk melihat apakah ada perubahan atau tida setelah *La'ó Hamutuk* melakukan peninjauan pada tahap awal dua tahun silam.

Liputan kami yang terus-menerus tentang **sumber minyak dan gas Timor Lorosa'e** di dalam Laut Timor menghadirkan kesaksian *La'ó Hamutuk* di hadapan parlemen Australia, yang mendesak tetangga kita di bagian selatan ini untuk menghormati kedaulatan dan wilayah kita. Kami mengakhiri edisi ini dengan dua editorial mengenai **kegagalan keadilan internasional**: mengenai pengadilan *ad hoc* hak asasi manusia di Jakarta, dan tentang satu kesepakatan bahwa Timor Lorosa'e tidak menyerahkan para personil Amerika Serikat kepada Mahkamah Pengadilan Kejahatan Internasional.

Bantuan Portugis kepada Timor Lorosa'e

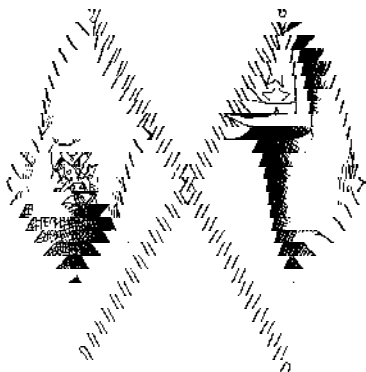
Di seluruh dunia, Portugal biasanya tidak dianggap sebagai suatu negara donor yang besar. Akan tetapi di Timor Lorosa'e, pemerintah Portugis terlihat mencolok dan berpengaruh, karena menjadi salah satu dari tiga donor terbesar bagi negeri ini (bersama dengan Jepang dan Australia).

Di seluruh Dunia

Portugal adalah salah satu pendiri Development Assistance Committee (DAC, Komite Bantuan Pembangunan adalah suatu kelompok dari 22 pemerintah donor besar dari Organisasi Pembangunan Eropa, OECD) pada tahun 1961, tetapi mereka meninggalkan kelompok tersebut pada tahun 1974, karena mencari bantuan dari negara-negara lain guna membantu pemulihan dari masa kekuasaan fasis dan pembubaran imperium penjajahannya. Pada 1986, Portugal bergabung dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (sekarang Uni Eropa), yang memberikan dukungan yang sangat besar dan dengan demikian memperkuat ekonominya sedemikian rupa sehingga Portugal kembali masuk ke dalam DAC di 1991.

Meskipun demikian, Portugal tetap merupakan salah satu negara Barat yang lemah secara politik dan ekonomi, serta mempunyai pendapatan per kapita paling rendah dari 22 negara anggota DAC. Pada 1999, Portugal memberikan US\$ 289 juta untuk Bantuan Pembangunan Resmi (Official Development Assistance, ODA). Jumlah ini merupakan 0,26% dari pendapatan nasionalnya, lebih rendah daripada rata-rata bantuan negara anggota DAC yang besarnya 0,39% dari pendapatan nasional mereka, tetapi masih lebih besar daripada tiga negara donor penting lainnya untuk Timor Lorosa'e: Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Pemerintah Portugis telah menambah jumlah bantuan ini dalam tahun-tahun belakangan ini dan telah menetapkan sasaran untuk mencapai kembali 0,36% dari pendapatannya, satu-satunya jumlah tertinggi yang diraih pada tahun 1994, dalam jangka waktu dekat, dan sasaran PBB 0,7% (sebagaimana disepakati pada Konferensi Rio 1992) pada tahun 2006.

(Bersambung ke halaman 2)



Di dalam . . .

| | |
|--|----|
| Dukungan dari Portugal di Sektor Pendidikan | 4 |
| Meninjau Kembali CEP | 7 |
| LH: Perjanjian Laut Timor yang Sekarang Jangan Diratifikasi | 12 |
| Berita Singkat | 15 |
| Editorial: Indonesia Gagal Memberikan Keadilan . | 17 |
| Editorial: Kemerdekaan dan Kekebalan Hukum | 20 |

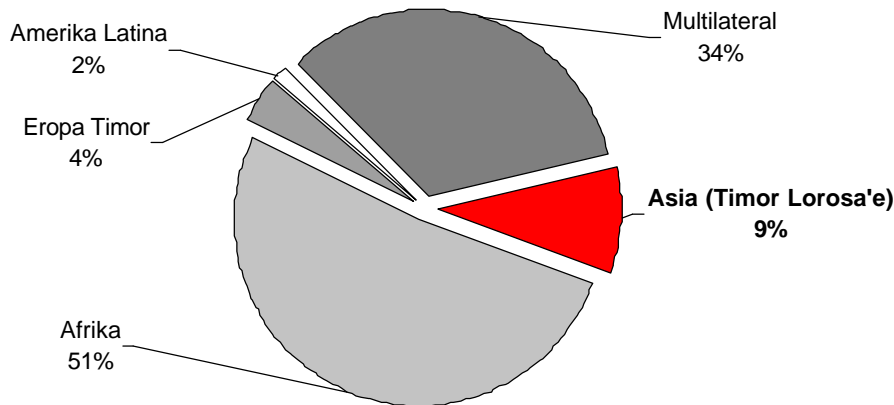
La'ó Hamutuk, Institut Pemantau dan Analisis Rekonstruksi Timor Lorosa'e
P.O. Box 340, Dili, East Timor (via Darwin, Australia)

Mobile: +61(408)811373; Telepon: +670(390)325-013

Email: laohamutuk@easttimor.minihub.org Situs/Web: <http://www.etan.org/lh>

Grafik 1: Bantuan Portugis di Seluruh Dunia, 2002

Total: US\$ 395 juta



Eropa Timur: Masedonia dan Bosnia

Afrika: bekas negara-negara jajahan Portugis, termasuk Maroko, Aljazair, Tunisia, dan Benin

Asia: hampir seluruhnya Timor Lorosa'e

Sumber: Pemerintah Portugis

Sepanjang dekade 1990-an, bantuan pemerintah Portugis dialokasikan hampir seluruhnya hanya kepada bekas koloni-koloni Portugis di Afrika (Mozambique, Cabo Verde, Angola, Guinea-Bissau, dan São Tomé e Príncipe), dengan Mozambique sebagai penerima donor terbesar. Portugal memberikan bantuan multilateral melalui badan-badan PBB, Kelompok Bank Dunia dan bank-bank pembangunan regional (Bank Pembangunan Afrika dan Bank Pembangunan Antar-Amerika), serta Uni Eropa. Portugal belakangan ini juga bergabung dengan Bank Pembangunan Asia (ADB), di bulan April 2002, untuk memajukan kepentingan bisnis Portugis di Asia dan lebih terlibat dalam berbagai kegiatan ADB di Timor Lorosa'e. Walaupun dalam tahun-tahun belakangan ini dua pertiga sampai tiga perempat bantuan Portugis adalah bantuan bilateral. Pada 1999-2000, sedikitnya 50% dari bantuan bilateral Portugis ditujukan untuk meringankan utang, sementara bantuan negara-negara anggota DAC untuk meringankan

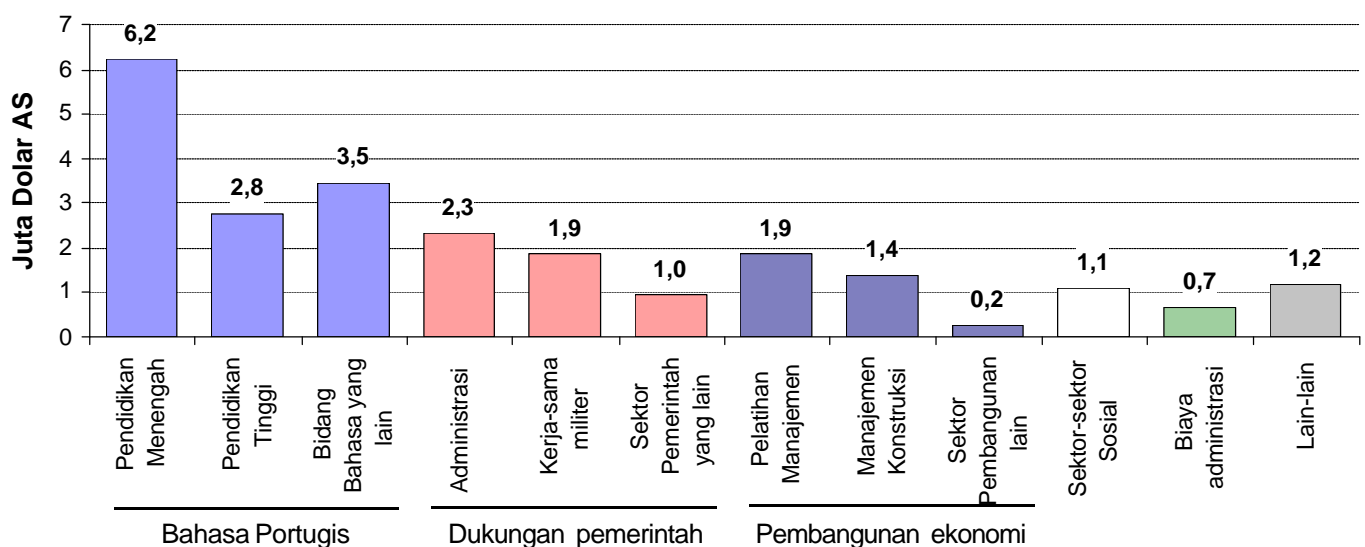
utang rata-rata hanya mencapai 4%. Hal ini disebabkan oleh bantuan dalam utang yang tidak dibayarkan kembali yang dikeluarkan oleh pemerintah Portugis kepada koloni-koloninya di Afrika, dan Portugal tidak ingin lagi memberikan pinjaman serupa pada masa mendatang. Lihat Grafik 1 mengenai tinjauan atas Bantuan Portugis dewasa ini di seluruh dunia.

Bidang-bidang utama lainnya dari bantuan Portugis di seluruh dunia ialah pendidikan dan kesehatan – yang tidak begitu besar untuk pelayanan sosial dasar yang menguntungkan kaum miskin, tetapi lebih banyak untuk pendidikan tinggi, beasiswa dan perawatan medis di Portugal, yakni pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada kaum elit dari negara-negara penerima. Ada juga pengutamaan yang besar pada pelatihan dan bantuan teknis untuk administrasi pemerintah, urusan yudisial dan bidang militer, demikian juga untuk meningkatkan dan membangun kembali sektor swasta.

Sulit untuk mendapatkan pandangan keseluruhan yang

Grafik 2: Rencana Bantuan Bilateral Portugis kepada Timor Lorosa'e, 2002

Total: US\$ 24 juta



TFET, dukungan anggaran, dan sumbangan multilateral lainnya tidak diperlihatkan.

Sumber: Kedutaan Besar Portugis di Dili, dokumen bulan September 2001

jelas tentang bantuan Portugis karena bantuan tersebut diberikan melalui cara yang didesentralisasikan. Meskipun Kementerian Luar Negeri Portugis mengkoordinasikan keseluruhan program bantuan, pada kenyataannya 17 kementerian pemerintah, dan juga badan-badan lain, universitas-universitas dan pemerintah-pemerintah kota menjalankan berbagai program sendiri-sendiri. Pada tahun-tahun belakangan ini, suatu Dewan Menteri untuk Urusan Kerjasama dan Komite Antar-Kementerian dibentuk untuk mengkoordinasikan bantuan yang datang dari departemen pemerintah yang berbeda-beda. Tiga badan bantuan yang utama berada di dalam Kementerian Luar Negeri:

- √ Instituto Camões, yang mempromosikan kebudayaan dan bahasa Portugis
- √ Badan Dukungan Pembangunan Portugis (APAD), yang memusatkan pada penanaman modal dan sektor swasta Portugis;
- √ Institut Kerjasama Portugis (ICP), yang mengkoordinasikan seluruh kebijakan pembangunan.

Bantuan Portugis kepada Timor Lorosa'e

Sejak Juni 1999 hingga Mei 2002, ada suatu kantor Komisaris Dukungan Transisi di Timor Lorosa'e (CATTIL), di bawah pimpinan Pastor Victor Melícias Lopes. CATTIL pada saat itu berfungsi sebagai suatu badan yang untuk sementara waktu "mengkoordinasikan prakarsa-prakarsa yang berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan program-program dukungan bagi proses pengumpulan pendapat rakyat dan proses transisi yang berkaitan dengan proses penentuan nasib sendiri Timor Lorosa'e." Badan ini dibubarkan tidak lama setelah Timor Lorosa'e mendapatkan pangakuan kemerdekaan, dan bantuan kepada Timor Lorosa'e sekarang berada di bawah suatu struktur yang terdesentralisasi sebagaimana biasanya.

Selama masa transisi, CATTIL mengarahkan sejumlah program di berbagai bidang, juga mendukung lembaga-lembaga internasional. Portugal adalah negara donor terbesar kedua untuk Dana Perwalian bagi Timor Lorosa'e (Trust Fund for East Timor, TFET) Bank Dunia, dengan memberikan lebih dari US\$ 15 juta dan menjanjikan bantuan selanjutnya sebesar US\$ 35 juta. Selama 1999-2000, Portugal memberikan hampir US\$ 10 juta untuk upaya bantuan kemanusiaan multilateral, dan juga US\$ 4,5 juta untuk mendukung InterFET. Selain bantuan bilateral, kepolisian dan militer Portugis juga menjadi komponen penting dari pasukan penjagaan perdamaian internasional di bawah UNTAET, dan meneruskan

partisipasinya dalam pasukan penjaga perdamaian di Timor Lorosa'e. Brigadir Jenderal Paulo José Guerreiro dari angkatan bersenjata Portugis baru-baru ini telah diangkat menjadi komandan dari sedikitnya 160 personil Pemantau Militer PBB di wilayah ini.

Menurut pemerintah Portugis, bantuan mereka kepada Timor Lorosa'e memiliki tiga prioritas resmi: "untuk mengkonsolidasikan Negara Timor Lorosa'e, perekonomian pasar, dan bahasa Portugis sebagai bahasa resmi." Mempromosikan bahasa Portugis menjadi kegiatan utama (kegiatan ini dibahas dalam tulisan lain dalam buletin ini). "Mengkonsolidasikan Negara" meliputi berbagai proyek, yang difokuskan pada bantuan teknis di bidang administrasi publik, khususnya di bidang-bidang seperti hukum dan peradilan, statistik, pelatihan profesional, dan pelatihan militer. Pada tahun 2001, US\$ 2,2 juta dianggarkan bagi pelatihan dan peralatan militer, yang unsur utamanya adalah US\$ 1,6 juta untuk dua kapal patroli operasi lama yang telah diperbaiki dan untuk melatih 36 personil angkatan bersenjata FDTL yang bertugas menjaga perairan Timor Lorosa'e. Pada tahun yang sama, US\$ 139.000 juga dianggarkan untuk mendukung brigade pemadam kebakaran (bekerjasama dengan Australia) dan pelayanan-pelayanan perlindungan sipil lainnya. Dari tahun 2000-2001, kurang lebih US\$ 5,5 juta telah dialokasikan untuk proyek-proyek lain di bidang dukungan pemerintah.

Dari 1999-2001, Portugal mendistribusikan sekitar US\$ 8,9 juta dalam bentuk bantuan untuk pengembangan ekonomi. Bantuan ini disebar ke berbagai macam proyek, dengan fokus pada sejumlah sektor seperti infrastruktur (khususnya penyediaan air bersih di Baucau dan Aileu, pelayanan listrik, pelatihan teknis bandar udara Comoro), pertanian (termasuk pembibitan pohon kopi di Ermera), perikanan, kehutanan, pertambangan, pariwisata, dan pembangunan perkotaan.

Tahun lalu, pemerintah Portugis menganggarkan lebih dari US\$ 24 juta dalam program bilateral untuk tahun 2002, yang rinciannya diperlihatkan dalam Grafik 2.

Tetapi pada saat buletin ini naik cetak, pemerintah Portugis dan Timor Lorosa'e sedang melakukan perundingan mengenai bantuan, yang rinciannya tampaknya akan mengalami perubahan. Pada konferensi donor terakhir, Portugal tidak mendiskusikan proyek-proyek bilateral yang ada sekarang, tetapi berjanji untuk juga menutupi 10% dari anggaran taksiran Timor Lorosa'e yang besarnya US\$ 90 juta untuk tiga tahun mendatang. ❖

Ralat: Bantuan Amerika Serikat

Dalam *Buletin La' o Hamutuk* Volume 3, No. 6, halaman 11, kami memuat sebuah tabel yang mengikhtisarkan janji-janji pada konferensi donor bulan Mei 2000. Untuk Amerika Serikat, janjinya US\$ 1,05 juta untuk keuangan militer asing dan pelatihan serta pendidikan kemiliteran untuk Angkatan Pertahanan Timor Lorosa'e yang terpisah dari, tidak termasuk US\$ 25 juta yang dijanjikan untuk bantuan pembangunan. Terima kasih kepada kedutaan Amerika Serikat atas penjelasannya.

Dukungan Portugis di Sektor Pendidikan

Sektor yang paling besar mendapatkan bantuan dari Portugal selama dua tahun terakhir di Timor Lorosa'e adalah pendidikan. Fokus program-program pendidikan Portugal adalah mempromosikan bahasa Portugis, setelah keluarnya keputusan dari pemimpin-pemimpin Timor Lorosa'e untuk menjadikan bahasa Portugis sebagai bahasa resmi. Prioritas difokuskan pada pendidikan dasar dan menengah, terutama dengan mengirimkan guru-guru dari Portugal ke Timor Lorosa'e, dan melatih guru-guru Timor Lorosa'e dalam bahasa Portugis. Juga disediakan berbagai program pelatihan bahasa untuk profesi-profesi yang lain, serta bantuan untuk pembangunan kembali prasarana pendidikan dan untuk pendidikan tinggi (universitas).

Pendidikan Dasar

Dalam pendidikan sekolah dasar, sekarang bahasa Portugis merupakan bahasa pengantar untuk tiga tahun pertama. Setiap tahun ditambahkan satu tahun pengajaran bahasa Portugis, sehingga dalam tahun ajaran berikutnya, empat tahun pertama akan diajarkan dalam bahasa Portugis, dan dalam waktu tiga tahun (2005), seluruhnya enam tahun sekolah dasar akan diajarkan dalam bahasa Portugis. Untuk memperlancar peralihan ini, Portugal sedang melatih guru-guru sekolah dasar Timor Lorosa'e dalam bahasa Portugis serta mengenai pedagogi pengajaran. Selama dua tahun terakhir ini, hampir 3500 dari 3600 guru yang terdaftar telah menyelesaikan pelatihan tersebut.

Penelitian terbatas *La'o Hamutuk* mengenai masalah ini menemukan tanggapan yang berbeda-beda dari guru-guru sekolah dasar Timor Lorosa'e. Sebagian sekolah merasa beruntung karena mendapatkan bantuan dari Portugal, yang selain melatih guru, juga menyediakan buku-buku pelajaran dan bahan-bahan pendidikan lain bagi sekolah-sekolah, dan kadang-kadang juga membangun kembali prasarana pendidikan. Satu sekolah dasar di kawasan Farol, Dili, beberapa gedungnya dibangun kembali oleh pemerintah Portugis. Namun demikian, beberapa ruangan tidak selesai dibangun kembali, dan sekolah tersebut tidak diberitahu kapan perbaikan yang belum selesai yang telah dijanjikan oleh Portugal akan dilanjutkan lagi.

Namun demikian, sekolah-sekolah lain mempunyai pengalaman yang tidak begitu baik menyangkut hubungan mereka dengan pemerintah Portugis. Guru-guru di sekolah dasar lain di wilayah Dili mengatakan kepada *La'o Hamutuk* bahwa mereka tidak mendapatkan manfaat dari latihan yang diberikan oleh guru-guru Portugis. Mereka tidak setuju dengan

metode latihan yang digunakan, dan mereka juga mendapatkan terlalu banyak kritik negatif dan kurangnya dorongan yang positif. Mereka mengatakan bahwa banyak lagi guru Timor Lorosa'e tidak mau lagi mengikuti latihan. Walaupun pendaftaran dalam program pelatihan bersifat sukarela untuk dua tahun ajaran terakhir ini, guru-guru di sekolah ini menyatakan bahwa kepala sekolah memaksa mereka untuk ikut, dengan dukungan dari Kementerian Pendidikan dan pemerintah Portugis.

Pendidikan Menengah

Dalam pendidikan menengah, 151 guru dari Portugal sekarang ini sedang mengajar bahasa Portugis sebagai bahasa kedua kepada murid-murid sekolah menengah di seluruh negeri.

Guru-guru tersebut dikontrak untuk masa kerja satu tahun yang bisa diperpanjang, mulai bulan September. Walaupun program ini tidak ditetapkan dengan jangka waktu yang tertentu, kemungkinan besar programnya akan berlanjut untuk beberapa tahun yang akan datang. Seperti banyak program bantuan yang lain, mempekerjakan profesional internasional seperti guru membutuhkan banyak dana. Guru-guru ini, yang biasanya dikelompokkan dalam pasangan, tinggal di penginapan yang bisa dikatakan mewah jika diukur dengan standar setempat, yang dilengkapi dengan generator, pendingin udara, dan peralatan mahal seperti *microwave*, mesin cuci, dan lemari es be-

Kontroversi seputar *Língua Portuguesa*

Keputusan untuk menjadikan bahasa Portugis sebagai bahasa resmi merupakan keputusan yang ditentang sebagian anggota masyarakat, terutama dari kalangan generasi muda di negri ini. Pendapat yang diungkapkan seorang mahasiswa di UNTIL (Universidade Nasional Timor Lorosa'e) mewakili perasaan banyak orang mengenai keputusan ini: "sebenarnya, saya tidak suka bahasa Portugis dijadikan bahasa resmi Timor Lorosa'e; selama 24 tahun rakyat Timor Lorosa'e memperjuangkan kemerdekaannya, supaya kita mempunyai budaya, ciri-ciri khas, dan bahasa sendiri, bahasa Tetun. Tapi mengapa bahasa Portugis ditetapkan sebagai bahasa resmi kita? Ini menciptakan dilema yang besar bagi banyak orang muda sekarang ini, sepertinya keinginan orang lain dipaksakan pada kita semua, hanya untuk kepentingan politik luar. Misalnya, di sekolah-sekolah dasar bahasa Portugis sudah diajarkan dan saya melihat itu sebagai cara untuk membuat anak-anak Timor Lorosa'e mempelajari dan lebih mengetahui budaya negara lain daripada budayanya sendiri."

sar. Pemerintah Portugal menganggap bahwa pengeluaran untuk membangun penginapan seperti ini bagi warganegara Portugis merupakan bagian dari sumbangan mereka kepada Timor Lorosa'e, karena gedung-gedung yang dibangun akan diserahkan kepada pemerintah Timor Lorosa'e pada saat programnya sudah selesai. Guru-guru ini mengajar bahasa Portugis kepada murid-murid sekolah menengah, yang biasanya juga belajar dengan menggunakan bahasa Tetun, Indonesia, dan Inggris. Oleh karena sebagian besar dari siswa sudah terbiasa dengan sistem pendidikan Indonesia, tidak mengherankan bila banyak di antara mereka merasa enggan untuk belajar bahasa Portugis. Banyak yang mengeluh bahwa bahasa Portugis terlalu sulit, dan menganggap bahwa bahasa Inggris adalah bahasa Barat yang lebih berguna.

Banyak guru yang dikirimkan dari Portugal tidak berpengalaman atau hanya mempunyai pengalaman sedikit saja dalam mengajar bahasa Portugis sebagai bahasa asing. Akan tetapi, pemerintah Portugis baru-baru ini mengubah persyaratan untuk memilih guru-guru tersebut, dengan tujuan untuk

lebih mendapatkan mereka yang telah mendapatkan pendidikan untuk mengajar bahasa Portugis sebagai bahasa asing. Pada bulan Juli 2002, beberapa guru yang sudah bekerja di Timor Lorosa'e tidak dapat memperpanjang kontrak kerja mereka karena tidak memenuhi syarat yang baru. Seperti dapat diduga, sejumlah guru merasa kecewa dan marah karena kehilangan pekerjaan, dan mereka merasa bahwa Kementerian Pendidikan Portugis tidak mempertimbangkan pengalaman yang telah mereka dapatkan di sini. Akan tetapi, adalah baik untuk melihat upaya semacam untuk meningkatkan mutu keterlibatan Portugal dalam sektor pendidikan.

Pendidikan Tinggi

Portugal mendukung pendidikan tinggi untuk Timor Lorosa'e dengan tiga cara: dukungan untuk universitas nasional (UNTL), mengirim mahasiswa-mahasiswa Timor Lorosa'e ke universitas-universitas di Portugal, dan membantu mahasiswa Timor Lorosa'e yang sedang menyelesaikan kuliah mereka di Indonesia.

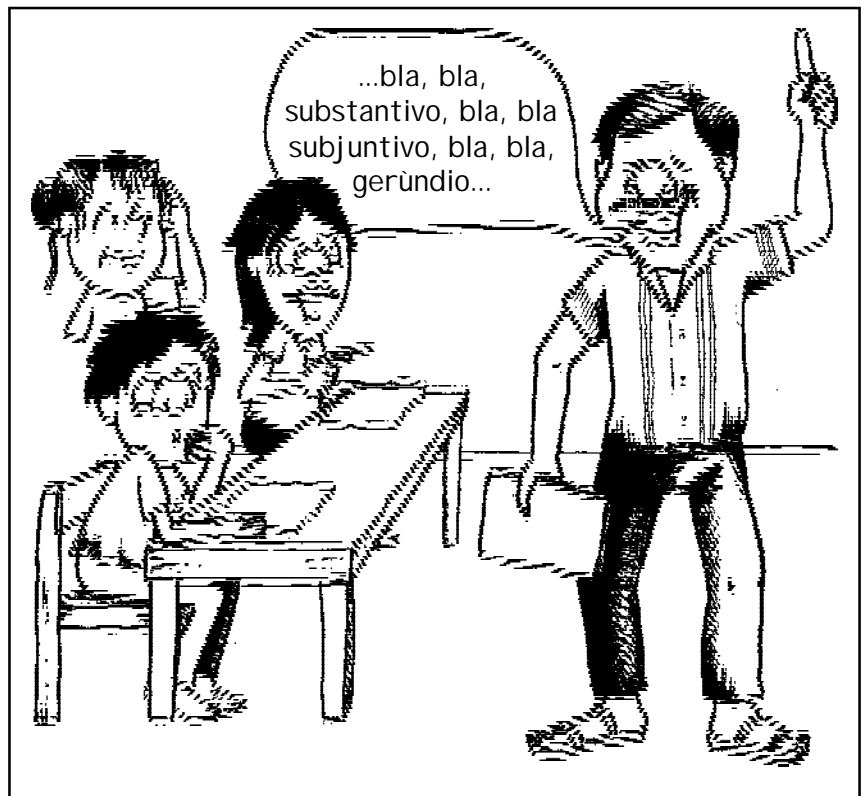
Bantuan Portugal untuk sistem universitas nasional berpusat pada Fundação Universidade Portuguesa (FUP, Yayasan Universitas Portugis) yang mulai beroperasi pada tahun 2001 di Liceu Francisco Machado di Dili.

FUP memusatkan perhatian pada empat fakultas:

- 1) Teknik Sipil, termasuk elektronika dan teknologi informasi
- 2) Pertanian, termasuk pencatatan hak tahanan, kehutanan, dan sosial ekonomi pertanian
- 3) Ekonomi, termasuk manajemen
- 4) Pendidikan bahasa Portugis

Dua belas sampai lima belas dosen untuk FUP dipilih dari antara dosen-dosen Portugis yang mempunyai ijazah pascasarjana dan digaji oleh pemerintah Portugis. Dosen-dosen ini biasanya datang untuk masa waktu tiga bulan, kemudian kembali ke Portugal. Bahasa pengantarnya adalah bahasa Portugis. Para mahasiswa mengalami kesulitan bahasa dalam hal ini. Akan tetapi, setiap fakultas mempunyai dua penerjemah bahasa Portugis-Indonesia supaya para mahasiswa dapat memahami yang diajarkan. Terjemahan juga disediakan pada saat ujian. Dari sudut pandang lain, para mahasiswa harus belajar bahasa Portugis karena universitas mengharuskan bahwa mahasiswa belajar bahasa pengantar tersebut. Bantuan dari FUP juga termasuk pendirian laboratorium ilmu komputer dan penyediaan bahan-bahan pengajaran kepada UNTIL.

Menurut seorang dosen Timor Lorosa'e pada UNTIL, "jika seseorang memahami banyak bahasa, maka dia menjadi kaya karena semua bahasa yang dikuasainya. Yang diutamakan di kampus UNTL adalah bagaimana para mahasiswa bisa mendapatkan pengetahuan dan menerapkannya dalam masyarakat. Setelah satu tahun berjalannya program FUP (2001-2001), kami bisa melakukan evaluasi dan tanpa keraguan mengatakan bahwa programnya berjalan dengan baik."



Belajar di Luar Negeri

Pemerintah Portugis telah memberikan beasiswa kepada 314 mahasiswa Timor Lorosa'e untuk belajar di Portugal. Belajar di negara yang jaraknya jauh dari negara sendiri dan dengan budaya yang berbeda, tidak mengherankan bahwa lebih sebagian mahasiswa mengalami kesulitan. Delapan mahasiswa telah pulang kembali ke Timor Lorosa'e dan ada yang tidak lagi mengikuti kuliah meskipun tetap Eropa untuk bekerja. Mahasiswa-mahasiswa yang telah kembali dari Portugal menceritakan kepada *La'o Hamutuk* mengenai kesulitan-kesulitan mereka:

- √ Di Timor Lorosa'e mereka hanya mengikuti kursus persiapan selama enam bulan dan tidak dipersiapkan dengan baik untuk belajar di Portugal; mereka mendapati bahwa kenyataan hidup di Portugal tidak sama dengan apa yang diberitahukan kepada mereka sebelum berangkat ke Portugal.
- √ Mereka mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan dosen yang mengajar dengan terlalu cepat bagi mahasiswa yang baru belajar bahasa Portugis. Mahasiswa Timor Lorosa'e mengikuti kuliah dengan pelan-pelan dan merasa sulit untuk bergaul dalam kuliah, sehingga mereka memahami sangat sedikit dari apa yang diajarkan.
- √ Para mahasiswa Timor Lorosa'e kuliah bersama-sama dengan para mahasiswa Portugis yang mempunyai harapan yang berbeda dan sudah terbiasa dengan proses pengajaran yang berbeda, sehingga mahasiswa Timor Lorosa'e tidak bisa memahami kuliah mereka.
- √ Hidup dalam budaya dan masyarakat yang berbeda itu sulit. Mahasiswa Timor Lorosa'e ditempatkan di penginapan yang jauh dari mahasiswa Timor Lorosa'e yang lain, dan ini berarti sulit bagi mereka untuk saling memberikan dukungan, dan ini juga mempertinggi perasaan keterasingan mereka.

Dengan dorongan dari pemerintah Timor Lorosa'e, pemerintah Portugis berencana untuk mengakhiri program beasiswa di Portugal bila semua mahasiswa yang sekarang belajar di sana atas beasiswa sudah menyelesaikan kuliah mereka, dan setelah itu dukungan dari pemerintah Portugis akan lebih diarahkan pada pengembangan UNTL. *La'o Hamutuk* mendukung keputusan ini, karena UNTL memerlukan banyak bahan dan dukungan moral agar bisa terus berkembang. Hal ini juga akan lebih mendorong hubungan bilateral yang sehat antara Timor Lorosa'e dan Portugal, karena kedua pemerintah akan lebih bekerja bersama-sama untuk memperkuat sebuah lembaga yang dapat memberikan manfaat besar bagi seluruh bangsa. Akan tetapi, bantuan tersebut tidak boleh mencampuri kebijakan negara Timor Lorosa'e sekarang atau di masa depan, karena harus menjamin bahwa orang-orang Timor Lorosa'e adalah pengambil keputusan di negara mereka sendiri.

Portugal tidak hanya membantu mahasiswa Timor Lorosa'e yang belajar di Portugal dan Timor Lorosa'e. Mereka juga sedang membantu 100 mahasiswa Timor Lorosa'e yang sebelumnya sudah belajar di Indonesia pada waktu pendudukan Indonesia, tetapi tidak dapat melanjutkan kuliah mereka.

Berbagai macam lembaga donor internasional membantu mahasiswa Timor Lorosa'e yang belajar di Indonesia (lihat tabel di sebelah kanan). Sebelum referendum, sekitar 4.000 orang mahasiswa Timor Lorosa'e mengikuti pendidikan di universitas-universitas di Indonesia, tetapi hanya sekitar 2.000 yang berkeinginan untuk kembali ke sana melanjutkan kuliah mereka setelah referendum. Seperti dipertunjukkan dalam tabel, dana yang terbatas diberikan oleh delapan negara dan organisasi.

Pemerintah Portugis sekarang ini membiayai 100 mahasiswa untuk belajar di Indonesia. Mereka ini baru saja diseleksi. Pemerintah Portugis menjanjikan lebih dari US\$ 700.000 untuk membiayai kuliah selama tiga tahun, dari bulan September 2002 hingga bulan Agustus 2005, termasuk ongkos perjalanan kapal terbang pulang pergi dan biaya hidup yang berjumlah sekitar US\$ 60 tiap bulan per mahasiswa. Mahasiswa yang dibiayai adalah yang sebelumnya telah menyelesaikan kuliah selama lima semester, tetapi tidak mem-

Donor-donor Yang Mendukung Mahasiswa Timor Lorosa'e Belajar di Indonesia

| Donor | Mahasiswa |
|---|-----------|
| Caritas Norwegia dan Program Beasiswa Uskup Belo (BBSP) | 390 |
| Jepang | 300 |
| Ford Foundation | 200 |
| Pemerintah Indonesia (hanya sampai 20 Mei 2002) | 162 |
| Pemerintah Portugis | 100 |
| Badan Kesehatan Sedunia (WHO) | 68 |
| Pemerintah Jerman | 20 |
| Pemerintah Prancis | 6 |

punyai uang untuk menyelesaikan kuliah mereka di Indonesia.

Oleh karena menginvasi dan menduduki Timor Lorosa'e selama lebih dari 400 tahun, Portugal mempunyai tanggungjawab untuk membantu bangsa ini berkembang secara politik dan budaya, dan untuk menghormati kemerdekaan negara ini yang berhasil dicapai setelah perjuangan yang berat dan panjang. Selama tiga tahun terakhir, Portugal adalah salah satu donor utama, walaupun Portugal sendiri adalah negara kecil, dan terbatas pengalamannya dalam hal bantuan bilateral. Kemurahan hati tersebut harus berlanjut. Pemerintah Portugis telah mengidentifikasi persoalan-persoalan dalam proyek pendidikan mereka di Timor Lorosa'e, dan telah berusaha memperbaiki program-program mereka. *La'o Hamutuk* berharap bahwa pemerintah Portugis tetap terbuka pada kritik, dan kami senang bahwa mereka sepertinya berkeinginan untuk memperbaiki program-program bilateral mereka agar sejauh mungkin bermanfaat bagi rakyat Timor Lorosa'e. ❖

Siapa itu La'o Hamutuk?

Staf La'o Hamutuk : Inês Martins, Thomas (Ató) Freitas, Mericio (Akara) Juvenal, Yasinta Lujina, Adriano do Nascimento, Terry Russell, João da Silva Sarmiento, Charles Scheiner, Pamela Sexton, Jesuina (Delly) Soares Cabral, Andrew de Sousa

Penerjemah: Xylia Ingham

Dewan Penasehat: Sr. Maria Dias, Joseph Nevins, Nuno Rodrigues, Aderito de Jesus Soares

La'o Hamutuk berterima kasih kepada pemerintah Finlandia yang mendukung publikasi ini.

Meninjau Kembali Community Empowerment Project

Community Empowerment Project (CEP) yang dalam bahasa Tetun disebut “Timor Oan Hi’it An Rasik” dalam bahasa Indonesia “Proyek Pemberdayaan Masyarakat” adalah salah satu program pembangunan yang administrasinya dijalankan oleh Bank Dunia yang terbesar dan paling kelihatan di Timor Lorosa’e (lihat *Buletin La’o Hamutuk* Vol. 1, No. 4 mengenai penilaian awal tentang CEP). Tujuan CEP adalah “mendukung pengurangan kemiskinan” dan “membangun institusi-institusi lokal yang bertanggungjawab dan partisipatoris pada tingkat *suco* dan *aldeia*” Secara resmi dibentuk pada bulan Februari 2000 dengan dukungan dari pemimpin-pemimpin CNRT (Dewan Nasional Perlawanan Bangsa Timor), CEP telah menerima dana sebesar US\$ 18.5 juta dari Trust Fund for East Timor (TFET, Dana Perwalian untuk Timor Lorosa’e) yang didukung oleh banyak donor. \$12 juta dari total dana tersebut telah digunakan, kebanyakan untuk proyek pembangunan berbasis komunitas yang diputuskan dan dikoordinasikan oleh dewan desa dan dewan sub-distrik yang dipilih secara demokratis dan yang terdiri dari jumlah perempuan dan laki-laki yang sama. Bagian kecil dari \$12 juta itu juga digunakan untuk mendukung proyek warisan budaya, organisasi-organisasi lokal, dan radio/televisi komunitas.

Kantor Bank Dunia di Timor Lorosa’e menyebut CEP sebagai salah satu proyek yang paling berhasil, suatu proyek yang “memperkenalkan dan memberi contoh tentang prinsip-prinsip dasar demokrasi dan pertanggungjawaban di lebih dari 400 desa.” Di banyak desa, fasilitas air, balai desa, dan klinik memperlihatkan keberhasilan proyek ini. Tetapi banyak komunitas, termasuk di desa-desa yang proyek CEP berjalan dengan baik, kurang yakin bahwa proyek ini berguna untuk jangka panjang. Sementara hampir semua orang setuju tentang prinsip-prinsip yang didukung CEP – demokrasi, transparansi, pertanggungjawaban, partisipasi perempuan – adalah penting dan positif, namun banyak orang Timor Lorosa’e mempertanyakan apakah rancangan CEP dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut.

Selama empat bulan, *La’o Hamutuk* mengumpulkan informasi mengenai CEP di distrik Baucau, Lautem, dan Viqueque, serta dari kantor Bank Dunia dan kantor CEP di Dili. Temuan-

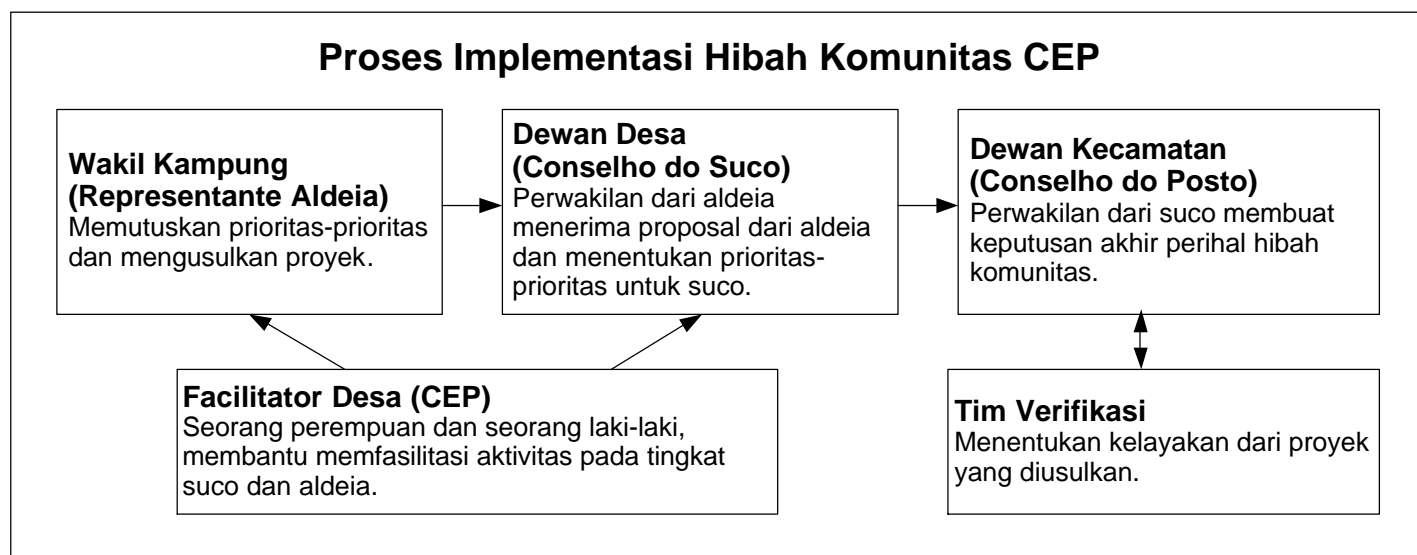
temuan kami mengangkat keprihatinan serius mengenai CEP, termasuk kurangnya koordinasi antara struktur CEP dan pemimpin-pemimpin tradisional desa, kurangnya penjangkauan berbasis komunitas dan kurangnya kepemilikan proyek oleh komunitas, dan kurangnya komitmen untuk membangun kemampuan dan pemberdayaan masyarakat yang sejati. Transparansi juga sangat rendah, baik di tingkat komunitas maupun di tingkat kebijakan tertinggi. Pada Konferensi Donor di Oslo, Bank Dunia melaporkan dukungan yang kuat dari kalangan rakyat Timor Lorosa’e untuk melanjutkan CEP setelah kemerdekaan. CEP saat ini didanai sampai akhir bulan Juni 2003 dan setelah itu pemerintah Timor Lorosa’e akan memutuskan apakah melanjutkan proyek ini atau tidak. Sementara Bank Dunia dan CEP mengatakan bahwa orang Timor Lorosa’e pada umumnya mendukung dilanjutkannya proyek ini, banyak orang Timor Lorosa’e berpendapat bahwa proyek ini tidak berhasil menjalankan misinya yang mulia dan justru merusak kemerdekaan Timor Lorosa’e.

Tinjauan tentang Komponen Hibah Komunitas CEP

Sejak CEP mulai, kira-kira 85% dananya digunakan untuk hibah komunitas. CEP memberi hibah kepada komunitas-komunitas dalam tahapan. Tahap pertama hibah dimulai April 2000 dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan darurat di tingkat *suco* dan *aldeia*. Kebutuhan darurat ini mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sosial, seperti balai pertemuan (43%), jalan dan infrastruktur pertanian (25%), pemulihan peralatan produktif dan peralatan rumah tangga yang rusak (15%), penyediaan air (10%), serta klinik dan sekolah (7%).

Tahap kedua hibah melanjutkan hibah komunitas dengan lebih banyak pilihan proyek yang terbuka bagi komunitas (pilihannya ada dalam daftar “menu terbuka” yang disertai daftar tentang apa saja yang tidak bisa didanai melalui CEP, seperti senjata api, gergaji mesin, dan gaji untuk pegawai pemerintah). Di banyak *suco*, proyek-proyek yang didanai pada tahap kedua dikatakan lebih berhasil daripada proyek-proyek tahap pertama. Dijelaskan bahwa ada perbaikan distribusi dan kontrol atas dana, dan juga perencanaan proyek.

Proses Implementasi Hibah Komunitas CEP



Tahap dukungan ini juga memulai suatu Program Bantuan Kelompok Rentan (seperti janda, anak-anak miskin, dan sebagainya), yang oleh orang-orang yang bekerja erat dengan CEP dikritik bahwa program ini terlalu lambat dan tidak efektif.

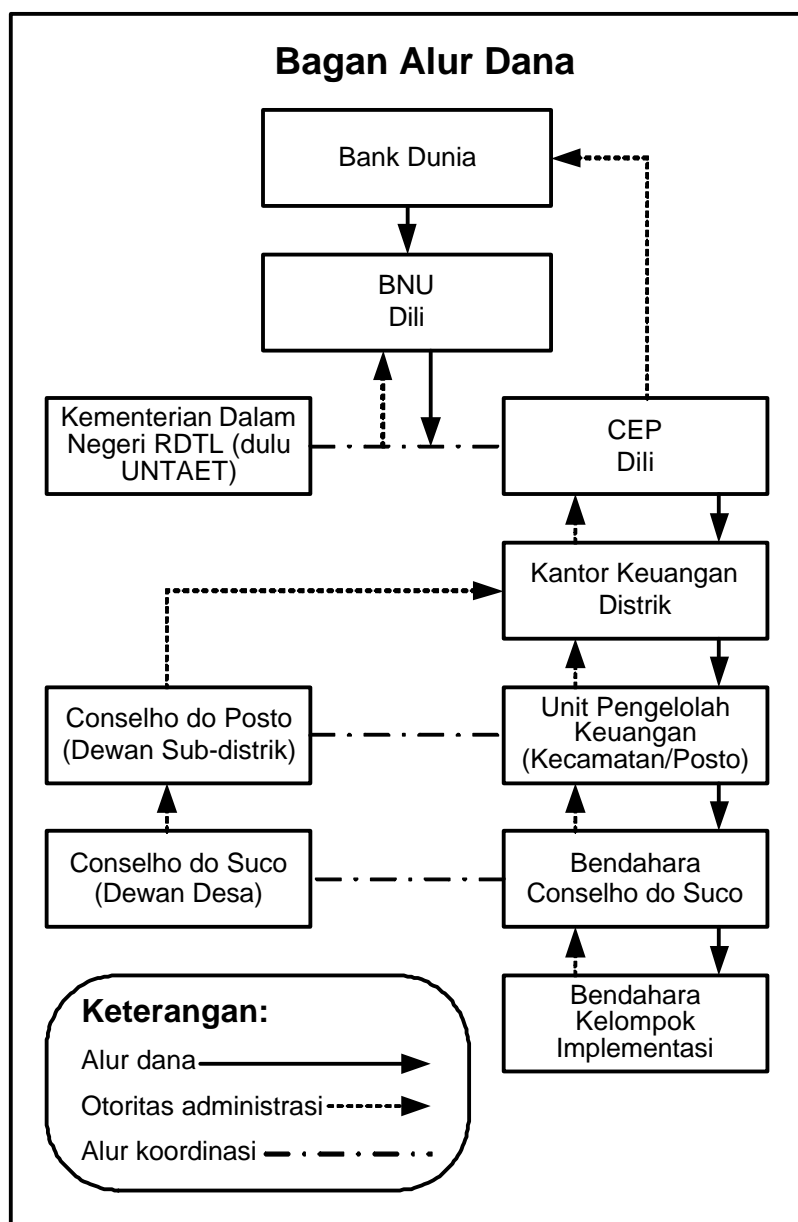
Tahap ketiga hibah baru saja dimulai dan umumnya melanjutkan apa yang dilakukan sebelumnya, sambil bekerja memperkuat lebih lanjut struktur-struktur pengambilan keputusan yang menjadi dasar dari CEP, yaitu dewan desa dan dewan sub-distrik. Dewan-dewan ini dibentuk melalui regulasi UNTAET yang dikeluarkan tepat sebelum proyek dimulai, walaupun pada awalnya ditentang oleh banyak pejabat UNTAET. Ketentuan legislasi ini menguraikan peraturan untuk memilih anggota-anggota dewan, dan menjelaskan hak serta tanggungjawab mereka dalam hubungan dengan fasilitasi proyek pembangunan lokal. Bank Dunia menjelaskan bahwa dewan-dewan ini merupakan bagian dari struktur pemerintah, bukan khusus untuk CEP. Namun, pada prakteknya, masyarakat Timor Lorosa'e menganggap bahwa dewan-dewan ini adalah bagian CEP dan Bank Dunia. Dan pada kenyataannya, dewan-dewan ini memang bukan bagian dari struktur pemerintah konstitusional Timor Lorosa'e.

Proses pengambilan keputusan untuk komponen hibah komunitas pada umumnya adalah sebagai berikut. Pertama, untuk setiap tahap dana yang baru, jumlah laki-laki dan perempuan yang sama dipilih oleh komunitasnya untuk menjadi wakil *aldeia* masing-masing. Mereka mengadakan musyawarah dengan masyarakat tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Kemudian, wakil-wakil *aldeia* mengajukan proposal mereka ke dewan desa, yang bertugas menilai dan menganalisis prioritas-prioritas pendanaan untuk berbagai *aldeia* yang mereka wakili.

Dewan desa kemudian meneruskan proposal-proposal ke dewan sub-distrik, yang menyusun prioritas semua proposal dan kemudian mendanai proposal prioritas tertinggi saja. Sebelum membuat keputusan akhir mengenai suatu hibah, dewan sub-distrik bertanggungjawab untuk menjain bahwa proyek-proyek prioritas itu sesuai dengan kenyataan di sub-distrik, suatu tugas yang kenyataannya dilakukan oleh tim verifikasi independen yang terdiri dari orang-orang Timor Lorosa'e yang memiliki keahlian untuk menilai kelayakan permintaan masyarakat. Setelah dewan sub-distrik memutuskan hibah yang harus diberikan, informasi ini disampaikan kepada kantor CEP di Dili, yang bertanggungjawab menyalurkan uang ke Kantor Keuangan Distrik. Menurut peraturan CEP, dana dicairkan sebesar hanya 50% dari dana yang diminta untuk masing-masing proyek. Setelah ada pertanggungjawaban yang jelas mengenai dana ini, 40% lagi dari dana yang diminta bisa dicairkan dan kemudian 10% terakhir. Lihat diagram di sebelah kanan.

Tantangan Implementasi CEP

Laporan *La'o Hamutuk* Desember 2000 mengenai CEP telah mengidentifikasi banyak kekurangan awal. Ini ter-



masuk ketegangan antara struktur CEP dan struktur-struktur pembuatan keputusan tradisional, pemilihan anggota dewan yang tidak demokratis, rendahnya perwakilan perempuan, dan keluhan-keluhan dari anggota dewan mengenai tidak adanya kompensasi uang untuk waktu yang mereka habiskan dalam kegiatan-kegiatan CEP, dan kurangnya komunikasi antara desa dan distrik dan di dalam masing-masing tempat. CEP berusaha terus untuk mengatasi tantangan ini. Restrukturisasi yang dilakuka baru-baru ini telah mendirikan kantor-kantor regional CEP untuk membantu dengan komunikasi dan untuk lebih mendesentralisasikan proyek ini.

Hampir dua tahun kemudian, pemilihan dewan dan fungsi-fungsinya di tingkat desa dan sub-distrik masih problematis. Di banyak desa yang dikunjungi oleh *La'o Hamutuk*, hanya sedikit penduduk desa yang terlibat memilih anggota-anggota dewan, dan dengan demikian anggota-anggota masyarakat tidak menganggap bahwa orang-orang yang duduk di dewan adalah wakil mereka. Banyak penduduk desa menjelaskan bahwa mereka tidak mengerti proses pemilihan. Ketegangan antara dewan-dewan dan struktur tradisional masih terus berlanjut. Kurangnya koordinasi antara CEP dan pemimpin-pemimpin desa mengakibatkan proyek berhenti

di tengah jalan dan munculnya perpecahan di dalam komunitas. Di beberapa desa, anggota-anggota komunitas mengkritik CEP karena hanya mengkoordinasikan kegiatan dengan pemimpin-pemimpin *suco* setelah munculnya masalah. Pada waktu yang sama, anggota-anggota ini menyatakan harapan agar CEP lebih pro-aktif dalam berkoordinasi dengan pemimpin komunitas. Sebagian dari masalah ini merupakan masalah khas dalam masyarakat yang telah mengalami konflik, dimana prasarana transportasi dan komunikasi sangat terbatas dan mungkin sudah ada perpecahan antara kelompok-kelompok dalam komunitas-komunitas. Memahami adanya tantangan-tantangan ini, banyak orang yang bekerja dalam CEP mengatakan bahwa tujuan CEP tidak realistis dan tidak memberikan perhatian yang cukup pada pengembangan kemampuan yang sungguh-sungguh di tingkat bawah.

Mengubah peran sosial laki-laki dan perempuan adalah salah satu tujuan CEP, yang oleh sejumlah orang dianggap lebih merupakan teori daripada praktek. Penyelidikan *La' o Hamutuk* menemukan bahwa di banyak tempat tidak ada atau sangat sedikit dilakukan pendidikan mengenai kesetaraan antar jenis kelamin. Di kebanyakan *suco* yang dikunjungi oleh *La' o Hamutuk*, pengikutsertaan perempuan dalam diskusi dan pembuatan keputusan sangat minimal. Misalnya, di *suco* Becorak, distrik Viqueque, perempuan dalam komunitas mengalami diskriminasi sehingga sewaktu barang-barang untuk digunakan komunitas diterima dari dana CEP, misalnya gerobak dorong atau peralatan lain, perempuan tidak diberikan kesempatan untuk menggunakannya. Banyak orang mengkritik Bank Dunia dan CEP karena berusaha mengubah budaya terlalu cepat, terutama melalui peraturan-peraturan tetapi tidak dilakukan melalui usaha-usah sistematis untuk meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan.

Wakil Direktur Nasional CEP Alvaro Ribeiro menjelaskan bahwa Bank Dunia hanya bertanggungjawab untuk administrasi dana dan bahwa masalah-masalah yang berkaitan dengan ketegangan antara CEP dan pemimpin-pemimpin tradisional harus diatasi oleh komunitas itu sendiri. "CEP hanya memberikan peraturan dan memfasilitasi proses. Komunitaslah yang sebenarnya bertanggungjawab atas proses tersebut." Tetapi banyak anggota komunitas, termasuk pemimpin tradisional, tidak bisa menjelaskan peraturan dan proses CEP karena peraturan dan proses ini terlalu rumit dan karena CEP belum menyampaikannya secara jelas. Juga, karena peraturan-peraturan ini tidak berasal dari komunitas, "proses" tersebut bukan milik mereka.

Banyak dari masalah yang dikemukakan di atas sumbernya adalah kekeliruan analisis tentang masyarakat Timor Lorosa'e. Manyadari bahwa keberhasilan CEP tergantung pada kemampuannya untuk bekerja erat dengan atau seputar struktur-struktur tradisional, Bank Dunia mengadakan sebuah penelitian antropologi tentang struktur kekuasaan tradisional dan CEP pada bulan September 2001. Penelitian ini, yang dilakukan oleh dua orang antropolog asing, menyimpulkan bahwa struktur tradisional itu tidak demokratis dan bersifat dari atas ke bawah sedangkan struktur "modern" (yaitu CEP) dianggap selalu demokratis dan berasal dari

bawah ke atas. Laporan penelitian ini juga mengemukakan bahwa tanpa intervensi komunitas internasional, masyarakat Timor Lorosa'e tidak akan mampu mengembangkan prinsip-prinsip "modern" ini. "Di daerah pedesaan Timor Lorosa'e," tulis laporan ini, "konsep-konsep politik tradisional ... baru saja mulai ditantang oleh pengaruh internasional dan masuknya ide-ide modern. Salah satu perbedaan pokok antara paradigma lokal dan modern adalah bahwa paradigma lokal itu bersifat hirarkis sedang gagasan kesetaraan adalah inti dari paradigma modern." Staf Bank Dunia dan CEP juga mengungkapkan pandangan ini, dengan melihat kurangnya demokrasi dan pertanggungjawaban di bawah kekuasaan Portugis dan Indonesia sebagai bukti bahwa orang Timor Lorosa'e sendiri tidak punya cukup banyak pengalaman atau pengetahuan tentang bagaimana mengarahkan diri menuju arah yang benar.

Pandangan ini juga terungkap dari pernyataan Ketua Bank Dunia di Timor Lorosa'e, Elizabeth Huybens, yang mengatakan bahwa rakyat baru mulai bicara dan mengerti istilah demokrasi, transparansi, dan pertanggungjawaban setelah proyek ini dimulai. Walaupun betul bahwa rakyat Timor Lorosa'e tidak mengalami prinsip-prinsip ini di bawah kekuasaan Portugis atau Indonesia, tidak berarti orang-orang Timor Lorosa'e belum menggunakan dan mengerti serta tidak punya rencana untuk membangun prinsip-prinsip tersebut.

Sebelum datang ke Timor Lorosa'e, Bank Dunia mengerjakan proyek yang mirip di seluruh Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Proyek-proyek ini dinyatakan menggantikan struktur yang sentralis, tradisional dan tidak demokratis dengan struktur pemerintah yang lokal adil dan bertanggungjawab kepada rakyat. Tetapi Bank Dunia adalah suatu institusi yang birokratis, besar, dan internasional dengan struktur pengambilan keputusan yang sangat jauh dari prinsip demokratis dan transparan (lihat *Buletin La' o Hamutuk*, Vol. 1, No. 4). Analisis-analisis dari berbagai negara menggolongkan Bank Dunia sebagai sebuah institusi yang sombong dan munafik.

Prototipe langsung CEP adalah suatu proyek yang dijalankan Bank Dunia di Indonesia, yang bernama Proyek Pembangunan Kecamatan (Kecamatan Development Project, KDP). Ketika orang Timor Lorosa'e mengikuti referendum kemerdekaan Agustus 1999, KDP telah dijalankan di Timor Lorosa'e hampir satu tahun. Fokus KDP adalah kontrol lokal dan transparansi dalam pemberian dana pembangunan. Namun, mandat CEP jauh lebih luas karena menambahkan pembangunan struktur pemerintahan lokal yang baru dan pemberdayaan komunitas pada pemerintahan lokal. Banyak konsultan penting CEP berasal dari KDP. Ini memunculkan keprihatin bahwa proyek CEP memprioritaskan tujuan KDP – pemberian uang dana pembangunan secara cepat dan transparan – lebih tinggi daripada tujuan-tujuan lain seperti pemilikan lokal dan pengembangan model-model pemerintahan lokal yang demokratis dan berkelanjutan.

Sementara Bank Dunia dan CEP berulang-ulang menyatakan komitmen mereka pada proses pembuatan keputusan yang mulai dari bawah ke atas, sebagian orang Timor Lorosa'e yakin bahwa ketentuan dasar CEP tidak memungkinkan munculnya inisiatif-inisiatif yang diajukan komunitas yang berbeda dengan ketentuan proyek ini. Misalnya, di sub-

distrik Iliomar, distrik Lautem, ketika para anggota dewan desa mengadakan musyawarah masyarakat, orang-orang yang hadir berulang kali menyampaikan kebutuhan akan sistem air bersih. Anggota-anggota komunitas menjelaskan kepada *La'o Hamutuk* bahwa staf CEP menolak proposal air bersih tersebut dengan menjelaskan bahwa dana yang dibutuhkan untuk penyediaan air bersih terlalu sedikit (hanya US\$ 900). Staf CEP mengatakan kepada komunitas bahwa kalau ada banyak proyek yang membutuhkan dana yang kecil, staf CEP akan sangat kesulitan memonitornya. Staf CEP ini juga mengatakan bahwa komunitas harus mengambil kesempatan untuk mendapatkan proyek yang dananya besar (menurut peraturan satu desa bisa mendapatkan dana sampai US\$ 5.000). Akhirnya proyek yang lebih besar dananya yang diusulkan oleh staf CEP dan diterima oleh dewan adalah perbaikan jalan. Tetapi, komunitas menolak bekerja memperbaiki jalan, mereka tidak menganggap perbaikan jalan itu suatu yang perlu dilakukan karena mereka tidak memiliki mobil dan motor. Selama ini mereka berjalan kaki ke sawah, kebun, dan pasar. Walaupun bahan-bahan untuk proyek perbaikan jalan sudah dibeli, sampai sekarang proyek tidak berjalan dan masyarakat masih menunggu air bersih.

Satu masalah dasar untuk CEP, yang sudah disebutkan di atas, adalah kurangnya rasa memiliki proyek ini oleh orang-orang Timor Lorosa'e. Dari tingkat *suco* sampai tingkat nasional, CEP dipandang sebagai proyek Bank Dunia. Salah seorang mantan staf mengatakan, "Mereka tidak membuat institusi-institusi lokal, tetapi membuat proyek Bank Dunia." Anggota-anggota komunitas lokal memandang dewan-dewan ini sebagai dewan CEP, bukan dewan milik mereka sendiri, dan kebanyakan orang Timor Lorosa'e percaya bahwa dewan-dewan ini akan bubar kalau tidak ada dana komunitas yang saat ini membuat dewan-dewan ini ada gunanya. Di tingkat nasional, proyek ini secara resmi dikontrol oleh pemerintah Timor Lorosa'e yang baru. Namun sejumlah staf CEP menyampaikan sangat kurangnya komunikasi antara CEP dan struktur pemerintah. Jika komponen warisan kebudayaan CEP mempunyai suatu dewan nasional yang terdiri dari para seniman, wakil-wakil gereja, organisasi-organisasi pemuda, perempuan, dan kelompok lain yang relevan, namun komponen hibah komunitas yang jauh lebih besar justru tidak mempunyai struktur seperti itu yang memberikan kontrol dan pertanggungjawaban yang lebih besar kepada orang Timor Lorosa'e.

Perencanaan dan transparansi yang kurang mengakibatkan konflik-konflik dan proyek-proyek yang berjalan berlawanan dengan prinsip-prinsipnya sendiri. Misalnya di desa Ailebere di distrik Lautem, CEP memberikan kredit kepada dua orang dengan mekanisme yang tidak transparan sehingga menimbulkan kecurigaan tentang adanya kolusi. Masyarakat setempat mengkritik bahwa kredit yang diberikan tersebut digunakan untuk mendirikan bengkel di Dili, bukannya digunakan untuk mendukung pengembangan masyarakat di Ailebere/Lautem sendiri. Di *suco* Fuat di sub-distrik Iliomar, Lautem, dana CEP digunakan untuk membangun suatu bak air dengan pipa tetapi ini tidak berguna karena letak desa sangat tinggi sehingga air tidak bisa dinaikkan dengan pipa tanpa pompa. Sayangnya, banyak anggota komunitas tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai proses-proses CEP dan oleh sebab itu mereka tidak bisa dimintai pertanggungjawaban proyek ketika persoalan-persoalan seperti ini muncul.

Dana Perwalian untuk Timor Lorosa'e

CEP didanai dari Dana Perwalian untuk Timor Lorosa'e (Trust Fund for East Timor, TFET). TFET dimulai setelah rapat para donor untuk Timor Lorosa'e di Tokyo, Jepang, pada Desember 1999. TFET adalah suatu sarana bagi negara-negara donor untuk mengumpulkan uang mereka yang digunakan untuk keperluan pembangunan kembali Timor Lorosa'e. Sekitar US\$ 173 juta telah dijanjikan kepada TFET untuk digunakan selama tiga tahun. Sejak awalnya, TFET diurus secara bersama oleh Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB). ADB mengurus perbaikan infrastruktur besar (telekomunikasi, listrik, air, dan jalan) dan keuangan skala kecil. Sementara Bank Dunia mengurus proyek kesehatan, pendidikan, pertanian, pembangunan sektor swasta, pemberdayaan komunitas (CEP), dan peningkatan kemampuan ekonomi. Semua proyek ini sekarang dilaksanakan oleh Pemerintah Timor Lorosa'e. Tidak ada proyek baru yang akan didanai TFET lagi, dan direncanakan bahwa semua dana dijanjikan para donor untuk diberikan kepada TFET akan selesai dibagikan pada akhir 2004. Dana TFET adalah hibah, yang tidak perlu dibayar kembali.

Pemantauan dan Evaluasi CEP

Di Timor Lorosa'e, sudah banyak pengkajian tentang CEP, termasuk beberapa yang didanai oleh Bank Dunia dan yang didanai oleh proyek CEP sendiri. Setiap pengkajian ini menemukan bahwa implementasi CEP secara umum memuaskan, dengan menyebutkan pembangunan jalan-jalan baru, sistem-sistem air baru, dan klinik-klinik kesehatan baru yang didanai oleh CEP. Pengkajian paling baru, pada bulan Juni 2002, juga menyimpulkan bahwa proyek ini memuaskan. Namun, pengkajian ini juga mengangkat masalah transparansi dalam manajemen dan pembukuan uang, serta rendahnya motivasi di kalangan staf

CEP yang disebabkan ketidakpastian tentang masa depan proyek.

Satu kritik pokok terhadap pengkajian-pengkajian ini adalah bahwa sebagian besar yang membuatnya adalah konsultan asing. Misalnya "Tim Misi Supervisi" pada Juni 2002 sepenuhnya hanya terdiri dari orang-orang asing yang bekerja berkoordinasi dengan petugas-petugas pemerintah dalam melakukan pengkajiannya. Koordinator Wilayah Timur CEP, Jose Barros mempertanyakan mengapa tidak banyak orang Timor Lorosa'e pekerja komunitas yang dilibatkan dalam pengkajian ini. "Sebaiknya lebih banyak orang Timor Lorosa'e yang tahu keadaan di lapangan yang dilibatkan dalam evaluasi-evaluasi Bank Dunia," katanya. Sambil mengakui manfaat bantuan Bank Dunia, ia mengharapkan keterlibatan orang Timor Lorosa'e yang lebih besar dalam proses evaluasi, perencanaan, dan pada pembuatan keputusan tingkat tinggi.

La' o Hamutuk juga berbicara dengan banyak orang di basis yang mengungkapkan tidak adanya mekanisme yang efektif bagi mereka untuk memberi masukan kepada proyek ini. Satu sebab sulitnya orang Timor Lorosa'e terlibat dalam peman-tauan proyek CEP dan proyek-proyek Bank Dunia yang lain adalah masalah bahasa. Kebanyakan dokumen proyek tingkat nasional, seperti penilaian proyek, kesepakatan pemberian hibah, dan hasil evaluasi, hanya tersedia dalam bahasa Inggris. Dokumen-dokumen dalam bahasa lokal umumnya hanya yang berkaitan dengan implementasi proyek di ting-kat komunitas. Sebagian staf CEP sendiri yang ingin tahu tentang proses kesepakatan hibah merasa dikesampingkan karena mereka tidak berbicara atau tidak mengerti bahasa Inggris.

Melihat ke Depan

Dalam waktu kurang dari satu tahun lagi, pemerintah baru Timor Lorosa'e akan memutuskan apakah CEP – secara ke-seluruhan atau sebagian – akan diteruskan atau tidak, dan kalau diteruskan, uangnya akan datang dari mana. Sampai sekarang, CEP didanai 100 % dari dana TFET tetapi kalau CEP diteruskan, sebagian atau semua biayanya akan diamb-il dari dana yang digunakan untuk mendanai anggaran pe-merintah Timor Lorosa'e. Bila hal ini terjadi maka akan mengurangi uang yang digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan, pendidikan atau keperluan penting lainnya. Pe-merintah perlu memutuskan apakah yang terbaik adalah CEP menggunakan dana yang terbatas ini, dan apakah dewan-dewan CEP adalah cara membuat keputusan yang lebih efektif daripada parlemen dan pemerintah. Jika demikian, keputusan-keputusan CEP harus dikoordinasikan dengan ba-dan-badan pemerintah yang bekerja di tempat yang sama.

Staf senior CEP menganggap bahwa proyek ini seharus-nya dilanjutkan. Tetapi, orang-orang lain beranggapan baha-wa dilanjutkannya CEP, yang masih terkait erat dengan pe-raturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan Bank Dunia, me-rupakan tindakan pelanggaran terhadap kemerdekaan Timor Lorosa'e dan merupakan suatu hambatan untuk mengatasi persoalan pemerintahan lokal di Timor Lorosa'e. Menurut pandangan mereka, CEP berada di luar Konstitusi Timor Lorosa'e dan tidak mempunyai mandat atau pengawasan parlementer, dan bahwa proyek ini fokusnya terlalu sempit pada pembagian dana, walaupun tujuannya jauh lebih luas.

Wakil Direktur Nasional CEP Alvaro Ribeiro merasa baha-wa dewan-dewan di *suco* dan sub-distrik harus tetap ada – dengan dana atau tanpa dana – karena dewan-dewan ini merupakan suatu model yang lebih demokratis daripada struktur tradisional. Country Manager Bank Dunia di Timor Lorosa'e, Elizabeth Huybens, menilai bahwa yang paling penting adalah prinsip-prinsip yang mendasari CEP itu harus diteruskan. Staf Bank Dunia dan CEP menyatakan komitmennya untuk belajar dari kesalahan yang dilakukan dan untuk memperbaiki mekanisme proyek. Mereka mengemukakan restrukturisasi dalam CEP – khususnya pem-bentukan kantor-kantor distrik – sebagai langkah positif un-tuk melakukan desentralisasi proyek ini. Meskipun demiki-

an, desentralisasi itu pada dirinya bukan demokrasi dan tidak secara langsung meningkatkan demokrasi. Bank Dunia dan CEP berjanji akan memperbaiki transparansi dan pertang-gungjawaban dalam pembagian dan penggunaan dana CEP. Lebih jauh, CEP telah menjelaskan bahwa mereka akan meninjau kembali semua proyek yang belum diselesaikan dan melakukan usaha-usaha untuk meneruskan proyek-proyek ini dalam tahap dana yang mendatang.

CEP akan dilanjutkan sedikitnya sampai bulan Juni 2003. Orang-orang Timor Lorosa'e yang diwawancarai untuk tulisan ini memberikan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut untuk memperbaiki CEP:

Ö **CEP harus menjamin bahwa dewan-dewan komuni-tas benar-benar mewakili komunitas lokal dan berkoordinasi secara penuh dengan struktur pimpinan lokal.** CEP bersama komunitas-komunitas lokal harus meninjau kembali peran dewan-dewan komunitas dalam hubungannya dengan struktur pimpinan lokal dan mem-perbaiki koordinasi antara badan-badan ini untuk meng-hindari konflik internal di desa-desa. CEP bersama dengan komunitas lokal harus meninjau kembali prosedur-prose-dur pemilihan dewan pemilihan ini benar-benar bebas, rahasia, dan tidak berdasarkan keputusan suatu kelompok kecil. CEP harus memastikan agar anggota-anggota dewan benar-benar mewakili komunitas setempat dalam memu-tuskan penggunaan dana CEP.

Ö **Bank Dunia dan CEP harus memberi komunitas-komunitas lokal informasi dan kontrol yang lebih baik atas perencanaan dan pelaksanaan proyek.** Semua dokumen yang berhubungan dengan proyek ini, dari ting-kat kebijakan Bank Dunia sampai tingkat pelaksanaan lokal, harus tersedia dalam bahasa dan bentuk yang bisa dimengerti kebanyakan orang Timor Lorosa'e. Prosedur-prosedur CEP harus lebih fleksibel, supaya komunitas lokal dapat membuat perubahan yang layak agar mereka bisa memperhatikan keadaan nyata dan prioritas-prioritas lokal. Rakyat Timor Lorosa'e harus mempunyai lebih ba-nyak kontrol terhadap proyek di tingkat nasional, kemung-kinan melalui suatu badan yang terdiri dari wakil-wakil berbagai sektor masyarakat dan pemerintah. CEP harus memperbaiki mekanisme agar bisa menjamin kerja efektif tim verifikasi pada tahap-tahap awal setiap usulan pro-yek.

Ö **Bank Dunia dan CEP harus membantu komunitas lokal untuk berpartisipasi penuh dalam evaluasi proyek.** Harus ada komitmen yang lebih kuat untuk me-libatkan anggota-anggota komunitas Timor Lorosa'e dalam evaluasi-evaluasi CEP. CEP harus bersikap pro-aktif dalam mengumpulkan pandangan-pandangan dari anggota-anggota komunitas. Mungkin suatu tim inde-penden dapat dibentuk yang terdiri dari staf CEP, anggota-anggota dewan *suco*, organisasi-organisasi non-pemerintah, dan orang-orang lain yang dipercaya oleh komunitas lokal. ❖

La'õ Hamutuk Kepada Parlemen Australia: Perjanjian Laut Timor Dalam Bentuknya Yang Sekarang Seharusnya Tidak Diratifikasi

Komite Tetap Gabungan untuk Perjanjian (Joint Standing Committee on Treaties) Parlemen Australia telah menerima usulan (kesaksian) dan mengadakan dengar pendapat umum mengenai Perjanjian Laut Timor. Perjanjian ini, yang belum diratifikasi oleh masing-masing negara, mengatur cara bagaimana pengelolaan sumber minyak di Kawasan Pengembangan Minyak Bersama (Lihat *Buletin La'õ Hamutuk*, Vol. 3, No. 4).

Lebih dari 70 organisasi dan perorangan menyampaikan usulan, termasuk empat organisasi dari Timor Lorosa'e: LAIFET (Labour Advocacy Institute of East Timor, Lembaga Advokasi Buruh Timor Lorosa'e), Forum NGO, CIITT (Centro Informaçãõ Independente ba Tasi Timor, Pusat Informasi Independen Laut Timor) dan *La'õ Hamutuk*. Beberapa orang dari tiga organisasi terakhir mengadakan perjalanan ke Darwin pada 3 Oktober guna memberikan kesaksian lisan pada dengar pendapat JSCT. Berikut kesaksian tertulis *La'õ Hamutuk*, yang disampaikan pada akhir bulan Juli oleh Adriano do Nascimento.

Yang Mulia Para Anggota Parlemen Australia,

Institut Pemantauan dan Analisis Rekonstruksi Timor Lorosa'e dengan ini menyampaikan informasi kepada Komite Anda untuk dipertimbangkan apabila Anda membahas Perjanjian Laut Timor antara Australia dan Timor Lorosa'e. Kami percaya bahwa masalah ini sangat penting bagi masa depan negara kami yang baru saja merdeka. Kami mendorong Parlemen Australia untuk memikirkan tentang tentangga Anda yang baru di sebelah utara, dan juga kepentingan nasional Anda sendiri, ketika Anda mempertimbangkan untuk meratifikasi perjanjian ini.

Perjanjian dalam bentuknya yang sekarang seharusnya tidak diratifikasi

Kami mendorong parlemen Australia dan parlemen Timor Lorosa'e untuk tidak meratifikasi perjanjian yang ditandatangani di Dili pada tanggal 20 Mei 2002 oleh Perdana Menteri John Howard dan Perdana Menteri Mari Alkatiri. Kami percaya bahwa perjanjian ini dirundingkan secara terlalu tergesa-gesa, dan dalam keadaan yang tidak seimbang, serta mengadakan banyak kekurangan yang serius. Karena berbadai alasan sejarah, moral, legal, dan pragmatis yang kami jelaskan berikut ini, kami mendesak kepada Komite Tetap untuk meminta pemerintah Australia agar melakukan perundingan ulang dengan pemerintah Timor Lorosa'e, dengan tujuan secepatnya melakukan revisi perjanjian ini, agar bisa lebih baik melindungi kepentingan Australia dan Timor Lorosa'e.

Pertukaran Nota dari tanggal 20 Mei memberikan satu dasar hukum yang baik untuk melanjutkan tanpa menghentikan atau menunda walaupun perundingan ulang membutuhkan waktu. Hal ini disebabkan karena situasi selama masa transisi. Dalam berbagai hal, ada persoalan besar keuangan, pajak, dan hal-hal lain yang belum dicakup bahkan juga oleh perjanjian yang diusulkan ini. Kami juga prihatin bahwa tidak ada jaminan bagi Timor Lorosa'e untuk memperoleh jatah lapangan kerja, keuntungan-keuntungan awal, dan pendapatan lain yang akan datang dari pengembangan minyak dan gas. Kami tidak menghendaki ketergantungan untuk selamanya pada sumbangan-sumbangan dan pendapatan dari kekayaan kami, namun kami juga mau mengembangkan pekerjaan, keahlian, tenaga kerja dan infrastruktur yang akan membantu kami menjadi benar-benar merdeka dan berdiri sendiri.

Kami berharap bahwa perjanjian yang dihasilkan oleh perundingan ulang, amandemen tambahan, atau pertukaran

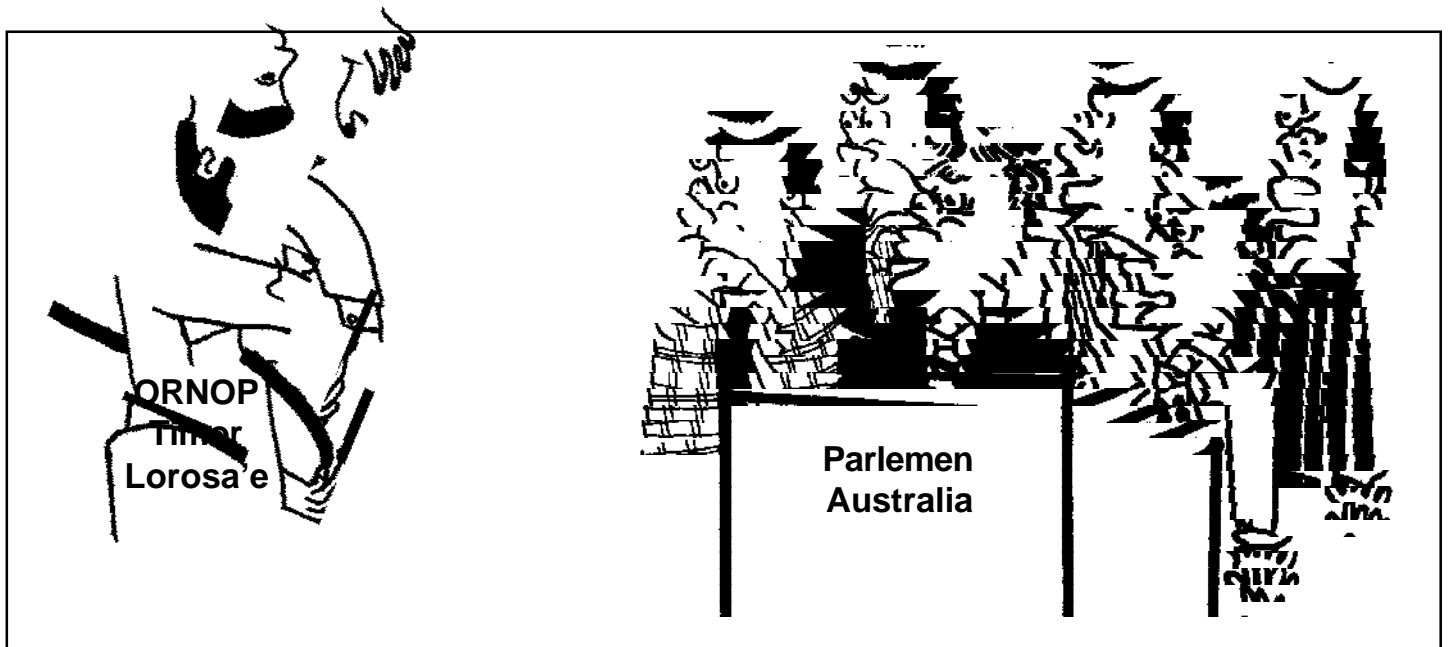
nota yang lain akan memasukan perlindungan yang memadai terhadap kedaulatan, batas negara, lingkungan hidup, demokrasi, dan kepentingan ekonomi Timor Lorosa'e. Dokumen yang ada sekarang adalah hasil dari tekanan yang dilakukan oleh negara yang besar dan maju terhadap negara kecil yang baru merdeka dan belum berkembang. Sejujurnya, kami terkejut bahwa Australia, sebuah negara dengan tradisi demokrasi dan hukum, akan meninggalkan keadilan dan kekuasaan hukum dengan memaksa Perdana Menteri kami untuk menandatangani suatu kesepakatan yang tidak adil dalam beberapa jam setelah kemerdekaan kami.

Perjanjian yang telah direvisi harus mendorong penyelesaian yang terbaik mengenai batas dasar laut

Dengan perjanjian yang diusulkan sekarang ini, Australia tidak memiliki dorongan untuk melakukan perundingan mengenai batas dasar laut antara Australia dan Timor Lorosa'e. Seperti Anda ketahui, belum pernah dibuat batas perairan antara kedua negara kita. Kami percaya bahwa adalah penting bagi hubungan kita untuk menentukan dengan cara terbaik zona ekonomi eksklusif kita masing-masing. Lebih lanjut, kami prihatin bahwa pendapatan dari minyak dan gas bisa habis, dengan Australia mendapatkan jauh lebih besar daripada bagian legalnya, sebelum perbatasan ini diselesaikan. Karena Perjanjian Laut Timor (Pasal 22) mengantisipasi bahwa diperlukan waktu 30 tahun lebih untuk menentukan perbatasan, maka keprihatinan kami sangat beralasan.

Oleh karena itu, kami menyarankan agar pendapatan dari ladang minyak dan gas yang berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif Timor Lorosa'e menurut prinsip-prinsip Hukum Laut (yaitu yang terletak di sebelah utara garis tengah antara kedua negara dan dalam jarak 200 mil laut dari garis pantai Timor Lorosa'e), tetapi diberikan kepada Australia berdasarkan perbatasan sementara Otoritas Pengembangan Minyak Bersama (JPDA) dalam perjanjian 20 Mei, disimpan oleh pihak ketiga sampai ditentukannya perbatasan.

Keseluruhan Otoritas Pengembangan Minyak Bersama (JPDA) terletak di sebelah utara garis tengah, sehingga berdasarkan hukum internasional semua pendapatannya adalah milik Timor Lorosa'e. 10% yang akan diterima oleh Australia berdasarkan Perjanjian Laut Timor yang diusulkan harus disimpan dalam simpanan perwalian. Yang lebih penting, ladang minyak dan gas Laminaria-Carrollina, Buffalo, Bluff, Buller, dan Greater Sunrise berada di sebelah utara garis tengah dan berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif Timor



Lorosa'e berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS). Karena penyelesaian perbatasan dapat memberikan sebagian atau semua pendapatan dari ladang minyak dan gas ini ke salah satu dari kedua negara kita, maka pendapatan dari ladang-ladang ini juga harus disimpan di simpanan perwalian. Dengan mengamankan pendapatan melalui cara seperti ini, kedua negara dapat dijamin bahwa hak-hak mereka dilindungi, dan kedua pihak akan melakukan upaya-upaya dengan niat baik untuk menyepakati perbatasan laut yang adil.

Kami juga prihatin bahwa persetujuan unitisasi ("Lampiran A") untuk Greater Sunrise tidak memberikan perlindungan yang cukup bahwa pembagian persentasinya akan diubah, untuk masa yang akan datang atau berlaku surut ke belakang, setelah perbatasan ditentukan. Pembagian pendapatan adalah 18,1% (90% dari 20,1%) untuk negara kami dan 81,9% untuk negara anda, yang kira-kira berdasarkan pada bagian ladang gas yang terletak di dalam JPDA. Batas JPDA adalah suatu warisan sejarah yang tidak ada hubungannya dengan perbatasan laut Timor Lorosa'e. Kalau perbatasan disetujui, hampir pasti perbatasan letaknya berbeda dari JPDA yang sekarang ini. Kesepakatan unitisasi Sunrise harus menjamin bahwa pembagian persentasi antara kedua negara kita akan disesuaikan agar sejalan dengan perbatasan, dan bahwa pendapatan yang diperoleh sebelum dan sesudah penyelesaian perbatasan dibagi secara adil antara kedua negara sesuai dengan letak perbatasan, tanpa memperhatikan sejarah ilegal batas ZOCA dan JPDA. Persetujuan juga harus menyatakan bahwa penyelesaian perbatasan ini akan lebih tinggi kedudukannya atas batas-batas JPDA yang diwarisi sekarang.

Banyak orang di sini memandang tindakan Australia melanjutkan pengeluaran izin eksplorasi di wilayah-wilayah yang dipersengketakan di dekat JPDA sebagai indikasi dari maksud Australia yang sebenarnya.

Dukungan Australia untuk Timor Lorosa'e baru-baru ini dulunya tidak demikian

Mulai tahun 1999, pemerintah Australia mendukung hak politik dan hak asasi manusia Timor Lorosa'e, dan kami menghargai hal ini. Kami berterima kasih kepada John Howard dan Alexander Downer yang menganjurkan Presiden

Habibie dari Indonesia supaya memperbolehkan masyarakat kami untuk menjalani pemungutan suara penentuan nasib sendiri, dan kami berterima kasih atas kepemimpinan Australia dalam pasukan InterFET dan berlanjutnya bantuan militer dan ekonomi Anda untuk menjamin transisi Timor Lorosa'e menuju kemerdekaan.

Namun kami tidak yakin bahwa dukungan dari tetangga kami di selatan ini akan terus berlanjut tanpa batas waktu. Kami belum melupakan Australia yang meninggalkan orang-orang kami untuk diduduki Jepang tahun 1942, dukungan pemerintah Anda pada invasi Indonesia terhadap negara kami pada tahun 1975, dan dukungan Anda pada pendudukan berdarah atas Timor Lorosa'e selama lebih dari 20 tahun, yang baru-baru ini dikonfirmasi oleh dokumen-dokumen resmi yang telah dibuka dan Penyelidikan Senat.

Kami secara khusus merasa kesulitan ketika kami mengingat perundingan, penandatanganan, ratifikasi Australia pada Perjanjian Celah Timor 1989 yang ilegal dengan Indonesia, yang mengimplementasikan kesepakatan bilateral untuk mencuri kekayaan alam yang merupakan milik sah rakyat kami. Ketika kami mengingat klaim pemerintah Australia pada tahun 1975 bahwa secara ekonomis kemerdekaan Timor Lorosa'e tidak akan bisa berjalan, yang digunakan sebagai alasan oleh Australia untuk mendukung invasi Indonesia atas negara kami, kemarahan kami meningkat.

Bantuan kemanusiaan Australia untuk Timor Lorosa'e sejak 1999 merupakan ketulusan, yang jumlahnya mendekati A\$ 200 juta, dan kontribusi Anda untuk InterFet dan PKF mungkin sebesar A\$ 2 milyar. Tetapi jumlah ini sangat kecil dibandingkan dengan lebih dari A\$ 40 milyar yang diperoleh pemerintah dari pendapatan ladang minyak dan gas di bagian utara dari garis tengah antara negara kita. Dalam perjanjian yang diusulkan, lebih dari separuh pendapatan ini, yang berdasarkan hukum internasional adalah milik Timor Lorosa'e, akan diambil oleh Australia.

Jika perjanjian ini dilaksanakan tetapi perbatasan tidak diselesaikan dengan baik, Australia akan mencuri pendapatan minyak dan gas lusinan kali lebih banyak dari apa yang telah diberikan kepada kami dalam bentuk bantuan militer dan bantuan kemanusiaan. Faktanya, dari tahun 1999 sampai 2001, Australia memperoleh pendapatan dari ladang minyak Laminaria-Corallina yang relatif kecil (yang menurut hukum in-

ternasional berada di dalam wilayah Timor Lorosa'e) yang tiga kali lipat lebih besar dari nilai bantuan kemanusiaan kepada Timor Lorosa'e selama periode yang sama. Dan sejak tahun 1989, selama pendudukan Indonesia dan masa transisi PBB, Australia mendapatkan lebih dari A\$ 1 juta dari JPDA saja.

Walaupun sekarang Timor Lorosa'e secara politik telah merdeka, tampaknya Australia sedang berusaha untuk mencapai perundingan sepihak dan tidak mematuhi hukum internasional yang tidak bisa diselesaikan Indonesia melalui pendudukan militer brutal.

Kami yakin bahwa rakyat Australia, melalui Parlemen dan Komite Tetap tentang Perjanjian, tidak mendukung perampasan terang-terangan warisan bangsa kami, dan kami mendesak pemerintah Anda untuk kembali memasuki komunitas bangsa-bangsa yang mematuhi hukum dengan mengadakan kerjasama kembali dengan proses-proses UNCLOS dan ICJ untuk menyelesaikan sengketa perbatasan laut. Kami mendorong Anda untuk memberi Timor Lorosa'e kepercayaan bahwa Australia berniat baik untuk merundingkan perbatasan ini dengan menempatkan pendapatan yang disengketakan pada pihak ketiga sampai masalah ini diselesaikan.

Kekuasaan hukum harus diajarkan dan dipraktekkan

Selama lebih dari empat abad, Timor Lorosa'e dikuasai oleh kekuasaan asing, yang berada di bawah rezim-rezim otokratik dan korup yang melanggar hak asasi manusia dan hak politik kami demi tujuan politik, ekonomi, dan pribadi mereka. Kami berjuang melawan kolonialisme Portugis dan pendudukan Indonesia agar kami dapat memerintah diri sendiri dengan cara yang baik, adil, dan demokratis. Kami berjuang untuk membasmi korupsi, kolusi, nepotisme, penindasan, kekuasaan sewenang-wenang, dan penggunaan sumberdaya umum untuk keperluan pribadi.

Sekarang kami telah mencapai kebebasan dan kemerdekaan politik, kami sedang belajar mengikuti prosedur demokratis konstitusional dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat kami. Salah satu diantaranya yang utama adalah kekuasaan hukum, bahwa pemerintah secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip tertentu yang telah disepakati oleh seluruh masyarakat melalui wakil-wakil mereka yang terpilih. Tak seorang pun diperbolehkan untuk melanggar prinsip-prinsip ini tanpa mempedulikan berapa besar kekuasaan yang mereka miliki, di mana mereka dilahirkan, siapa kerabat mereka. Walaupun kami telah lama percaya pada kekuasaan hukum, kami sampai sekarang belum pernah bisa mempraktekannya.

Sepanjang sejarah, negara-negara yang kaya, kuat dan berkuasa selalu menggunakan kekuasaan mereka untuk mengeksploitasi negara-negara yang miskin secara tidak adil dan mencuri kekayaan alam mereka. Dari pengalaman kami sendiri, kami mengetahui hal ini dengan baik. Tetapi dalam beberapa tahun belakangan ini, dengan munculnya kebebasan politik dan menurunnya imperium kolonial, bangsa-bangsa telah bertekad kuat pada diri mereka untuk mencegah eksploitasi semacam itu di kemudian hari. Dengan berpegang pada konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional, semua orang seharusnya diperlakukan dengan baik. Ketentuan yang sama harus berlaku bagi orang besar maupun kecil, kaya maupun miskin, berkulit hitam maupun putih. Perlindungan legal ini sangat penting bagi negara-negara seperti Timor Lorosa'e, yang

sedikit pengalamannya dalam hal memerintah diri sendiri dan hampir tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi negara-negara tetangga kami yang lebih besar dan kuat. Walaupun Australia dan Timor Lorosa'e sekarang duduk di meja perundingan sebagai dua pemerintah yang berdaulat, masih ada ketidakseimbangan fleksibilitas perundingan, kekuatan ekonomi, keahlian dalam keuangan, dan pengalaman diplomatik.

Australia dan negara-negara yang lain dalam komunitas internasional dengan konsisten mendorong pemerintah Timor Lorosa'e yang baru untuk melaksanakan demokrasi, kekuasaan hukum, transparansi dan pencegahan korupsi ketika kami membangun struktur dan praktek pemerintahan. Kami sangat menghargai dukungan seperti ini. Pada saat yang sama, Australia tidak mempraktekkan apa yang sedang Anda ajarkan. Ketika negara anda menarik diri dari proses hukum untuk menyelesaikan sengketa batas perairan, Anda mengajarkan kepada kami pesan yang berlawanan, yaitu bahwa ketika barang rampasan semakin besar, prinsip-prinsip hukum dibuang jauh-jauh.

National Interest Analysis (Analisis Kepentingan Nasional) pemerintah Anda mengenai penarikan diri dari arbitrase UNCLOS, yang diberikan kepada komite ini pada tanggal 18 Juni, mengatakan hal yang sama dalam bahasa yang lebih halus:

Tindakan ini sebelumnya tidak dibuka kepada publik dengan alasan untuk menjamin efektivitas deklarasi yang dipertahankan. Pengetahuan publik tentang tindakan yang diusulkan dapat menuntun negara-negara yang lain untuk bertindak mendahului deklarasi ini dengan memulai aksi melawan Australia dalam hubungan dengan penentuan perbatasan laut yang tidak dapat dibuat setelah deklarasi berdasarkan pasal 298 (1) (a) UNCLOS dibuat.

Dengan kata lain, pemerintah Anda bertindak secara rahasia dan tergesa-gesa mencegah Timor Lorosa'e menggunakan hak kami untuk berdasarkan hukum internasional.

Analisis Kepentingan Nasional tersebut selanjutnya menyatakan:

Pandangan Pemerintah adalah bahwa sengketa perbatasan laut ini lebih baik diselesaikan melalui perundingan, bukan litigasi.... Dibandingkan dengan negara-negara lain, Australia, sebagai pulau benua, memiliki perbatasan laut yang paling panjang di dunia. Australia memiliki perbatasan laut dengan banyak negara dan Pemerintah prihatin bahwa setiap usaha harus dilakukan untuk mencapai sebuah solusi yang disepakati tentang setiap sengketa perbatasan laut melalui perundingan damai.

Dengan kata lain, ketidakseimbangan kekuatan perundingan antara Australia dan Timor Lorosa'e benar-benar dieksploitasi sepenuhnya untuk memajukan kepentingan ekonomi Australia. Timor Lorosa'e tidak memiliki sumberdaya untuk kekuasaan hukum.

Penarikan diri Australia dari mekanisme wajib penyelesaian sengketa Konvensi Hukum Laut PBB dan Mahkamah Pengadilan Internasional bisa mencegah kami untuk memperoleh bimbingan dan keputusan dari sarana yang diakui internasional untuk mencapai penyelesaian arbitrase jika perundingan tidak bisa mencapai kesepakatan. Ini adalah kesempatan yang pertama sejak tahun 1975 bahwa Australia membatasi yurisdiksi yang Anda terima dari Mahkamah Pengadilan Internasional. Kami mendorong Australia untuk kembali pada kemauan untuk menerima semua sarana yang diberikan oleh hukum internasional

kepada negara-negara untuk menyelesaikan persoalan perbatasan laut dengan damai.

Pelajaran Australia dalam *realpolitik* akan membantu Timor Lorosa'e memahami bahwa hubungan internasional adalah dunia yang dingin dan kejam, dimana tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata dan keserakahan lebih penting daripada prinsip. Tetapi biaya politik dan ekonominya untuk rakyat kami tingginya tidak dapat diterima.

Masa depan keamanan Timor Lorosa'e dan Australia sangat tergantung pada perjanjian yang adil

Masa depan stabilitas dan kehidupan demokrasi Timor Lorosa'e dan juga kemampuan rakyat kami untuk memperoleh tingkat kehidupan dan pelayanan publik yang layak tergantung pada uang dari sumber minyak dan gas. Walaupun wilayah Laut Timor yang dipersengketakan mengandung nyaris semua sumber potensial Timor Loro'e yang dapat diekspor, Australia memiliki empat kali lebih besar sumber minyak dan gas di tempat lain, di wilayah yang menurut hukum internasional jelas milik Australia. Apakah Anda ingin mencuri masa depan kami untuk mempertebal dompet Anda?

Seperti yang anda ketahui, negara kami yang baru ini, baru saja mulai memulihkan diri dari seperempat abad pendudukan kejam militer Indonesia, yang berpuncak pada penghancuran besar-besaran "September Hitam" 1999, yang berakhir ketika Australia dan InterFET akhirnya datang untuk membantu kami. Kami sedang membangun lembaga-lembaga demokratik, infrastruktur, pelayanan sosial dan perekonomian kami nyaris dari titik nol. Sekarang ini untuk keberlangsungan hidupnya Timor Lorosa'e mengandalkan pada donor-donor internasional, suatu keadaan yang tidak sehat dan hanya bisa berlangsung dalam jangka pendek. Kami tergantung pada sumber alam kami, khususnya minyak dan gas kami, untuk memberikan sarana guna membangun bangsa dan melayani rakyat kami.

Australia, bekerja bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan perminyakan, telah mengambil keuntungan dari situasi kami yang serba kekurangan untuk memaksa Timor Lorosa'e menandatangani sebuah perjanjian yang membahayakan hak ekonomi dan wilayah kami.

Pada saat ini, 40% dari pendapatan JPDA yang oleh Australia dianggap sebagai milik Timor Lorosa'e disimpan pada pihak ketiga, sebenarnya merupakan sandera untuk menekan negara

Penjelasan: Eksplorasi Minyak

Buletin La'o Hamutuk Volume 3, No. 5, halaman 2, mencantumkan suatu bagan yang menggambarkan "Proses Eksplorasi Minyak," yang secara singkat memberikan daftar tahap-tahap dalam proses yang diikuti di banyak tempat di dunia. Otoritas Pengembangan Minyak Bersama (Joint Petroleum Development Authority) memberitahukan kepada *La'o Hamutuk* bahwa proses di Bayu-Undan dan tempat-tempat JPDA lainnya di Laut Timor berbeda dari skenario umum:

1. Mereka tidak mempergunakan dinamit untuk menghasilkan gelombang guncangan untuk eksplorasi seismik, tetapi menggunakan ledakan yang dihasilkan oleh tekanan udara.
2. Pemboran di Laut Timor hanya menghasilkan pasir, bukan batu. Sebagian terbesar pasir ini tidak ditinggalkan di dasar laut tetapi diangkut ke Australia.

kami agar meratifikasi Perjanjian 20 Mei. Kami melihat hal ini sebagai paksaan yang tidak adil, yang memperburuk ketidakseimbangan yang telah ada antara kedua negara. Kami meminta Australia untuk mencairkan uang ini, sehingga Timor Lorosa'e bisa mengurangi ketergantungan pada bantuan dalam periode yang kritis ini. Kedua negara telah menyepakati bahwa Timor Lorosa'e berhak atas 90% (bukan 50%) dari pendapatan JPDA, dan kesepakatan ini harus berlaku bukan saja untuk pendapatan sejak bulan Juli 2001, tetapi untuk semua pendapatan dari JPDA mulai 1999. Kompromi yang masuk akal bisa mulai dengan pembagian 90% bagi Timor Lorosa'e yang dimulai ketika kami memilih untuk merdeka pada bulan Agustus 1999, satu proses yang diakui oleh Australia dan Indonesia.

Kami percaya bahwa zaman imperium dan penjajahan sudah berakhir, dan kami mendorong Australia untuk bersikap sejalan dengan pemikiran abad ke-21 mengenai perilaku etis dan hak asasi manusia dan hak nasional.

Di seluruh dunia, gejala "kegagalan negara" sedang tumbuh, dengan konsekuensi yang buruk bagi warganegara bangsa-bangsa tersebut. Tetangga mereka juga terkena dampaknya seperti membanjirnya pengungsi, harus menyediakan bantuan darurat menyelamatkan nyawa, dan kebutuhan akan intervensi militer kemanusiaan. ❖

Berita Singkat. . .

Pada tanggal 17 Agustus, **Dewan Serikat-Serikat Buruh Australia (ACTU) mengadakan seminar tentang Laut Timor** di Darwin, Australia. Seminar ini dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat sipil Timor Lorosa'e, termasuk José Conceição da Costa (Presiden KSTL, Konfederasi Serikat-Serikat Buruh Timor Lorosa'e), Humberto José Alves (LAIFET, Lembaga Advokasi Buruh Timor Lorosa'e) dan Adriano do Nascimento (CIITT, Pusat Independen Informasi Laut Timor). Seminar ini merekomendasikan agar serikat-serikat buruh Australia:

√ Menuntut pemerintah Australia dan Timor Lorosa'e untuk meninjau kembali perjanjian yang ditandatangani pada

- tangga 20 Mei oleh Mari Alkatiri and John Howard
- √ Membangun jaringan kerja sama dengan Konfederasi Serikat Buruh Timor Lorosa'e (KSUTL)
 - √ Memberikan pelatihan dasar bagi buruh Timor Lorosa'e
 - √ Meminta Phillips Petroleum untuk membuat kesepakatan tentang perekrutan buruh Australia.

Pada tanggal 9 September, **Perdana Menteri Timor Lorosa'e, Mari Alkatiri mengunjungi proyek eksplorasi minyak dan gas alam Bayu-Undan** di Laut Timor. Dalam kunjungan itu, Alkatiri didampingi oleh Menteri Transportasi, Komunikasi dan Pekerjaan Umum Ovídio de Jesus Amaral

(bersambung ke halaman 16)

dan Menteri Keuangan Madalena Boavida. Sekembalinya dari kunjungan tersebut, Alkatiri mengungkapkan kegembiraan dan kepuasannya atas proyek perminyakan Bayu-Undan yang dikelola oleh Phillips Petroleum. Alkatiri mengatakan, “Ketika tiba di sana saya gembira dan puas. Saya melihat bendera RDTL berkibar di tengah lautan dan itu merupakan bukti yang baik. ...”

Pada tanggal 27 September, **Majelis Umum PBB secara bulat menerima Timor Lorosa’e sebagai Negara Anggota yang ke-191** Pemimpin-pemimpin dari seluruh dunia mengucapkan selamat kepada PBB dan delegasi Timor Lorosa’e (yang terdiri dari Perdana Menteri Mari Alkatiri, Menteri Luar Negeri José Ramos-Horta, Uskup Carlos Ximenes Belo, dan diplomat José Luís Guterres dan Constâncio Pinto) atas diraihnya kemerdekaan Timor Lorosa’e.

Dalam pidatonya, Presiden Xanana Gusmão mengatakan: “Inti dari keberhasilan ini, yang terutama, adalah Rakyat kami. Dengan menolak mengikuti jalan kekerasan, bahkan ketika diprovokasi, dengan melaksanakan hak mereka di dalam cara yang demokratis dan beradab, walaupun itu berarti mempertaruhkan nyawa, dengan memandang ke masa depan mengharapkan kepastian kebebasan, rakyat kami membuktikan kepada dunia bahwa mereka patut dihargai, dan oleh karena itu mendapatkan kepercayaan dan kekaguman dari semuanya.”

Hampir semua pembicara menyambut Timor Lorosa’e ke dalam komunitas bangsa-bangsa merdeka, hanya saja Duta Besar AS James Cunningham sendiri yang memberikan instruksi: “Kami menyambut kerja keras mereka untuk menjadi bangsa yang menikmati keterbukaan, demokrasi inklusif, ekonomi pasar, sistem hukum yang adil, dan hubungan yang serasi dengan tetangga-tetangganya.”

Setelah rapat Majelis Umum, bendera Timor Lorosa’e dikibarkan untuk bergabung dengan 190 bendera lainnya di depan Markas Besar PBB. Presiden Xanana dan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan memberikan sambutan singkat.

Komentar La’o Hamutuk: Kami bergabung dengan paduan suara menyambut Timor Lorosa’e ke dalam keanggotaan PBB, dan berharap bahwa wakil-wakil Timor Lorosa’e di sana akan menarik sejarah negara baru ini dalam mengatasi perang, pendudukan, dan pelanggaran hak asasi manusia untuk bangkit sebagai suatu bangsa yang damai, demokratik dan merdeka. Walaupun catatan singkat setelah kemerdekaan tidak banyak memberi harapan, kami mendorong para diplomat Timor Lorosa’e untuk mempergunakan suara mereka dan memilih kedamaian, keadilan, hak asasi manusia, dan penentuan nasib sendiri bagi segala bangsa, walaupun negara-negara berkuasa menekan negara kecil ini untuk mengikuti arah lain. Delegasi RDTL harus mengikuti Pasal 8 Konstitusi Timor Leste, yang mencantumkan prinsip-prinsip hubungan internasional RDTL:

“... kemerdekaan nasional, hak bangsa-bangsa atas penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan, kedaulatan permanen rakyat atas kekayaan dan sumber alamnya, perlindungan hak asasi manusia, saling menghormati kedaulatan, kesatuan wilayah dan persamaan antar Negara, serta tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri Negara lain.”

Pada 6 Agustus, sekitar 300 mahasiswa bentrok dengan polisi setempat dan polisi internasional yang menjaga gedung sebuah universitas di Dili. **Para mahasiswa memprotes laporan mengenai kenaikan besar biaya pendidikan yang harus mereka bayar.** Para mahasiswa melemparkan botol plastik dan batu ke arah polisi, tetapi tak seorang pun terluka. Kemudian para mahasiswa berdemobstrasi di luar kantor Perdana Menteri Mari Alkatiri, menuntut diturunkannya biaya kuliah. Demonstrasi tersebut merupakan yang kedua dalam waktu dua hari memprotes tingginya pengangguran dan tingginya harga barang kebutuhan pokok. Dewan Menteri menyatakan sedang mempertimbangkan pengurangan berarti di dalam biaya yang harus ditanggung para mahasiswa.

Pada tanggal 29 Agustus, **Centru Informasaun Independente ba Tasi Timor (CIITT, suatu koalisi organisasi-organisasi non-pemerintah) melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Nasional Timor Lorosa’e, Francisco Guterres (“Lu Olo”) di gedung parlemen.** Dalam pertemuan itu, Guterres mengatakan bahwa persoalan perbatasan laut dan Zona Ekonomi Eksklusif antara Australia dan Timor Lorosa’e harus diselesaikan berdasarkan hukum nasional Timor Lorosa’e yang telah ditetapkan dan hukum internasional yang termuat dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Ia juga mengatakan, “Menurut peta, kekayaan alam yang ada di Celah Timor adalah milik Timor Lorosa’e. Ini berdasarkan hukum internasional.”

Oxfam Internasional pada 18 September mengeluarkan suatu laporan yang menyatakan bahwa **berjuta-juta orang di 45 negara penghasil kopi sedang menghadapi “kehancuran ekonomi,”** dan bahwa kebanyakan dari rakyat tersebut menderita kelaparan. Laporan ini menegaskan bahwa sebabnya adalah turunnya harga kopi dunia selama beberapa tahun terakhir, serta semakin tumbuhnya kesenjangan keuntungan antara perusahaan-perusahaan kopi global yang terbesar dengan pendapatan yang semakin mengecil yang diperoleh para petani kopi. Laporan ini juga mengkritik “gagalnya kebijakan yang mempesona” dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) yang mendorong negara-negara untuk menghasilkan lebih banyak lagi komoditi ekspor seperti kopi, tetapi tidak mengingatkan mereka akan bahaya besar jatuhnya harga di pasar dunia. Oxfam menghimbau negara-negara penghasil agar menghancurkan persediaan kopi yang berlebihan guna menaikkan harga, dan mendesak perusahaan-perusahaan besar kopi untuk memberikan harga yang lebih baik kepada para petani kopi. Dengan implikasi penting bagi Timor Lorosa’e, laporan ini juga memperingatkan keterbatasan upaya untuk menjalankan suatu strategi “pasar khusus” berspesialisasi hanya menghasilkan kopi, karena banyak negara melakukan hal serupa. Laporan Oxfam ini tersedia pada situs www.maketradefair.com. ❖

Editorial: Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia Indonesia Gagal Memberikan Keadilan

Indonesia sekali lagi memperlihatkan noda pada sistem peradilanannya – ketidakmampuannya untuk memberikan keadilan dan mengakhiri kekebalan hukum bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia di Timor Lorosa'e tahun 1999, dan bahkan semenjak tahun 1975. Jika masyarakat internasional masih tetap menolak melakukan tekanan yang diperlukan, ketidakadilan akan tetap berlangsung. Masyarakat internasional memiliki tanggungjawab memperjuangkan keadilan bagi kejahatan yang tercantum dalam yurisdiksi internasional, yang mencakup kejahatan terhadap umat manusia yang terjadi di Timor Lorosa'e oleh tentara Indonesia, pejabat pemerintah, dan pihak lain yang menjalankan perintah mereka.

Kini, tuntutan internasional untuk mendirikan suatu pengadilan internasional bagi Timor Lorosa'e menjadi harapan terakhir. Akan tetapi, harapan ini semakin menjauh, ketika pemerintah Indonesia tidak memperlihatkan keinginan politik untuk meminta pertanggungjawaban dari para perwira militer dan polisi tingkat tinggi yang terlibat dalam kekerasan menjelang dan setelah referendum tahun 1999 yang diselenggarakan oleh PBB.

Sebaliknya, pemerintah di Jakarta sedang mempergunakan segala cara yang mungkin untuk melindungi para perwira, termasuk memanipulasi segala proses hukum dalam negeri. Pemerintah Indonesia juga telah berulang kali menunda pembentukan pengadilan tersebut untuk mengadili para pelaku kejahatan terhadap umat manusia.

Keadaan ini sekarang diperparah oleh lemahnya tekanan internasional, yang oleh Jakarta dibaca sebagai restu untuk tetap melakukan tindakan-tindakan di luar hukum, seperti tidak meminta pertanggungjawaban dari para pelaku kejahatan terhadap umat manusia.

Pengadilan *Ad Hoc* Hak Asasi Manusia juga memiliki pengalaman yang sangat terbatas di bidang hukum internasional – sebagaimana ditunjukkan dalam cara yang tidak profesional untuk menyusun dakwaan, yang menghilangkan aspek-aspek terpenting kejahatan terhadap umat manusia. Ketidakmemihakan para hakim dan jaksa pun patut dipertanyakan – perekrutan mereka tidak transparan. Dalam mengajukan pertanyaan dan pemeriksaan silang, mereka tidak efektif dan tidak menyentuh esensi dari pelanggaran hak asasi manusia.

Lagi pula, pengadilan tersebut juga memiliki yurisdiksi yang sangat terbatas, baik dalam dimensi waktu dan ruang, (hanya selama bulan April dan Oktober 1999, dan hanya meliputi tiga distrik: Dili, Liquiça, dan Covalima. Dakwaan-dakwaan juga sangat terbatas, dan tidak mengungkapkan kampanye kekerasan yang meluas, sistematis dan terencana di Timor Lorosa'e selama tahun 1999. Dakwaan-dakwaan oleh para jaksa menuntut *ad hoc* menggambarkan kekerasan tersebut sebagai kerusakan sosial antara kelompok pro-kemerdekaan dan pro-integrasi, serta gagal memasukkan keterlibatan langsung TNI dalam mendirikan dan mendanai kelompok-kelompok milisi Timor Lorosa'e.

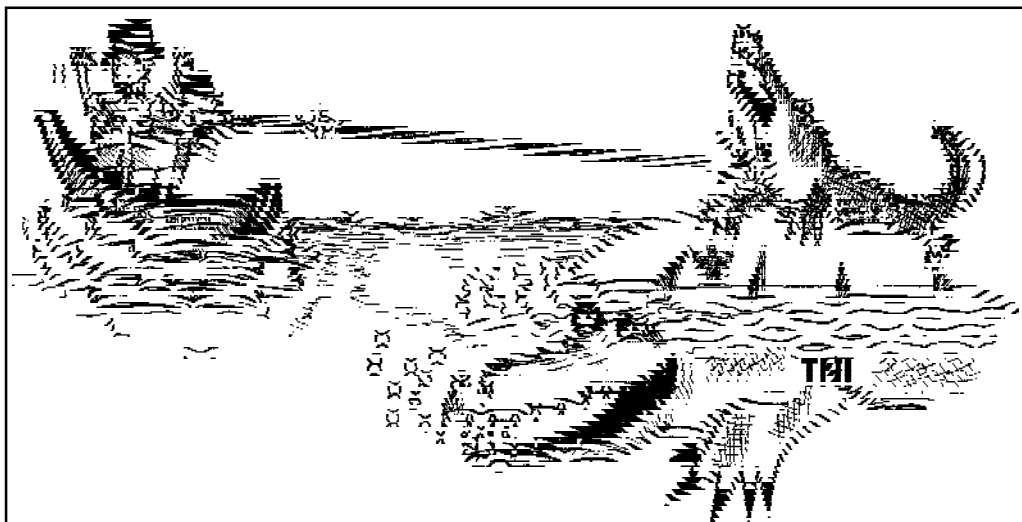
Pada pertengahan bulan Agustus, pengadilan tersebut menjatuhkan vonis hukuman yang pertama, membebaskan enam perwira militer dan polisi, dan menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada salah seorang Timor Lorosa'e (mantan gubernur yang ditunjuk Jakarta Abílio José Osório Soares) karena gagal “mengatur bawahannya secara efektif.” Amerika Serikat dan Uni Eropa mengeluarkan pernyataan kekecewaan yang lemah, tetapi kecaman keras muncul dari dalam Timor Lorosa'e dan banyak organisasi internasional.

Satu-satunya dakwaan terhadap para tersangka ialah ketidakmampuan mereka melaksanakan tanggungjawab dalam mengatur bawahan mereka. Abílio José Osório Soares, misalnya, jelas-jelas menyalahgunakan kekuasaannya untuk menyalurkan dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) guna mendanai kegiatan-kegiatan milisi, tetapi hal ini tidak dimunculkan sama sekali di dalam pengadilan. Alhasil, dakwaan tersebut hanya efektif menyeret para pelaku asal Timor Lorosa'e yang secara langsung terlibat di lapangan, dan menggelapkan dan membatasi tanggungjawab komandan militer Indonesia atas kejahatan terhadap umat manusia.

Sebagian besar bukti tentang keterlibatan langsung TNI di dalam kejahatan terhadap umat manusia juga tidak ditunjukkan di dalam pengadilan, walaupun sebenarnya bukti ini telah dikumpulkan dalam penyelidikan pada tahun 1999-2000 oleh badan-badan yang bisa dipercaya seperti Komisi Penyelidik Internasional PBB dan Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM (KPP-HAM) Indonesia, demikian juga sejumlah temuan Unit Kejahatan Berat UNTAET yang berbasis di Dili. Komisi Penyelidik PBB menemukan pelanggaran hak asasi manusia secara meluas, sistematis dan terencana di Timor Lorosa'e, serta merekomendasikan dibentuknya suatu pengadilan internasional untuk menghadapkan para pelaku ke pengadilan.

Pengadilan *ad hoc* hak asasi manusia juga memiliki sejumlah masalah administrasi mendasar yang terkait erat dengan akses publik pada dokumen-dokumen yang digunakan dalam persidangan. Tidak ada jalan bagi khalayak untuk mendapatkan dokumen-dokumen publik seperti dakwaan, pembelaan para tersangka, dan lain-lain.

Dan hingga April 2002, tak seorang pun saksi dari pihak korban dipanggil memberikan kesaksian, walaupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (pasal 160 [1]b) secara terang mencantumkan bahwa untuk kasus seperti ini saksi korban ha-



rus yang pertama memberikan kesaksian di hadapan pengadilan. Sebaliknya, para saksi yang dipanggil hingga saat ini seharusnya dicantumkan dalam daftar pelanggaran hak asasi manusia di Timor Lorosa'e. Lebih jauh, sejumlah saksi kunci yang dipanggil tidak mendapatkan perlindungan keselamatan yang layak. Banyak saksi Timor Lorosa'e enggan bersaksi karena tiadanya perlindungan untuk keselamatan mereka.

Karena segala kelemahan pengadilan *ad hoc* Jakarta ini, kita tidak perlu terkejut bahwa banyak pejabat Indonesia yang terlibat di dalam kekerasan didapati tak bersalah karena kurang bukti. Menyusul dibebaskannya enam perwira militer Indonesia yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, organisasi non-pemerintah nasional dan internasional di Timor Lorosae yang membentuk Aliansi Nasional untuk Pengadilan Internasional melancarkan serangkaian aksi protes. Aliansi memandang bahwa keputusan pengadilan tersebut tidak memberikan keadilan bagi masyarakat Timor Lorosa'e dan mereka mendesak bahwa sudah saatnya mendirikan suatu pengadilan internasional bagi Timor Lorosa'e.

Pada tanggal 17 Agustus, berlusin-lusin aktivis Timor Lorosa'e berdemonstrasi di luar gedung di mana perayaan hari nasional Indonesia sedang diadakan seraya menuntut pengadilan internasional, sementara banyak pemimpin Timor Lorosa'e berada di dalam. Delapan hari kemudian, Rede Feto, Jaringan Kerja Perempuan Timor Lorosa'e, menulis surat kepada Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Mary Robinson menolak "keberadaan dan seluruh proses Pengadilan *Ad Hoc* Hak Asasi Manusia," dan mendesak Robinson untuk mengupayakan pengadilan internasional. Tak lama berselang, Uskup Belo mengatakan bahwa seluruh komunitas internasional memiliki kewajiban untuk mendirikan pengadilan internasional. Karena yang terjadi di Timor Lorosa'e mengandung kejahatan terhadap umat manusia, "tak ada bagian dari ras manusia manapun, yang boleh secara sepihak mengingkari kejahatan-kejahatan seperti ini," tulis sang Uskup.

Dari dalam Indonesia sendiri juga ada sejumlah kritik keras terhadap keputusan pengadilan *ad hoc*. Ifdhal Kasim, Direktur Eksekutif ELSAM Jakarta mengatakan bahwa dibebaskannya Kepala Kepolisian Daerah Timbul Silaen dan Bupati Suai Kolonel Herman Sedyono merupakan suatu kegagalan besar para jaksa penuntut *ad hoc*. "Putusan membebaskan (para tersangka) akan menimbulkan suatu keraguan besar dari masyarakat internasional terhadap kemampuan para hakim dan jaksa dalam menangani jenis kejahatan yang pertama kali terjadi dalam sistem peradilan Indonesia," katanya.

Kecaman serupa datang juga dari berbagai organisasi non-pemerintah internasional termasuk Amnesty International, Catholic Institute for International Relations (CIIR), Tapol, ETAN, APCET, International Crisis Group, dan banyak organisasi lainnya. Amnesty International dan Program Pemantuan Sistem Yudisial yang berkedudukan di Dili, yang telah memantau proses pengadilan tersebut, menyimpulkan bahwa kini merupakan "momentum bagi PBB untuk meninjau kembali keputusannya untuk tidak menjalankan rekomendasi dari Komisi Penyelidik Internasional bagi Timor Lorosa'e mengenai pembentukan suatu pengadilan kejahatan internasional."

Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan dan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Mary Robinson memberikan reaksi keras terhadap dibebaskannya para tersangka. Annan juga secara tegas menyangkal tuduhan bahwa PBB merupakan

biang penyebab kekerasan di Timor Lorosa'e selepas jajak pendapat karena PBB sendiri merupakan korban dari kekerasan yang didalangi oleh TNI, polisi, dan milisi pro-Jakarta. Dengan demikian, PBB memiliki kewajiban hukum dan moral untuk memberikan keadilan tidak hanya kepada para stafnya yang terbunuh selama kekacauan tersebut, tetapi juga kepada rakyat Timor Lorosa'e. Ian Martin, dalam tulisan yang dimuat dalam *The Washington Post*, mengusulkan pengadilan internasional, dengan menyebutkan "matinya" harapan PBB agar Indonesia menghasilkan keadilan bagi kejahatan-kejahatan 1999 di Timor Lorosa'e.

Dari dalam Timor Lorosa'e, pejabat-pejabat pemerintah mengungkapkan reaksi yang beragam mengenai keputusan tersebut. Jaksa Agung Longuinhos Monteiro, SH, mengatakan bahwa rakyat Timor Lorosa'e benar-benar kecewa atas keputusan pengadilan Indonesia yang menurutnya sangat kontroversial. Jaksa Agung selanjutnya mengatakan bahwa keputusan tersebut jelas mengecewakan rakyat Timor Lorosa'e dan Indonesia yang prihatin akan masalah hak asasi manusia. Agio Pereira, Kepala Staf Presiden RDTL Xanana Gusmão, menyatakan bahwa proses pengadilan *ad hoc* tidak obyektif karena pengadilan tersebut tidak menyertakan tanggungjawab komandan.

Pada saat yang sama, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Mary Robinson yang hampir habis masa jabatannya mengadakan kunjungan terakhirnya ke Timor Lorosa'e. Lantaran tekanan dari masyarakat luas terhadap pemerintah agar mengambil sikap mengenai pengadilan *ad hoc*, Dewan Menteri lewat José Ramos-Horta menyatakan pemerintah akan menentukan sikapnya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Akan tetapi masalah ini telah tertelan oleh masalah-masalah mendesak lainnya; dan hingga sekarang belum ada sikap pemerintah yang jelas mengenai pengadilan *ad hoc*. Anehnya, setelah mengadakan pertemuan dengan Mary Robinson, Presiden Xanana mengusulkan didirikannya pengadilan perang untuk mengadili para jenderal Indonesia yang terlibat dalam kejahatan terhadap umat manusia di Timor Lorosa'e.

Sejak serangan 11 September 2001 terhadap Amerika Serikat, dan dengan membidik Irak sebagai bagian dari upaya pembalasan, prioritas keadilan internasional bagi Timor Lorosa'e telah dibayang-bayangi oleh perang melawan terorisme. Akan tetapi kejahatan-kejahatan yang terjadi di Timor Lorosa'e juga merupakan kejahatan terhadap umat manusia, dan didirikannya suatu pengadilan internasional bagi Timor Lorosa'e masih merupakan suatu hal yang relevan. Keadilan bagi Timor Lorosa'e juga memajukan demokratisasi di Indonesia. Jika tidak ada keadilan, lingkaran kekebalan hukum akan semakin berlanjut baik di Indonesia maupun di wilayah-wilayah lainnya.

Jadi, upaya untuk memperoleh pertanggungjawaban atas kejahatan terhadap umat manusia di Timor Lorosa'e berpulang pada Dewan Keamanan PBB dan komunitas internasional.

Kami menyesalkan bahwa pemerintah Timor Lorosa'e belum berbicara lantang menanggapi keputusan pengadilan *ad hoc* Jakarta. Pemerintah Timor Lorosa'e, bersama dengan masyarakat Timor Lorosa'e, seharusnya memiliki sikap yang jelas mengenai pengadilan *ad hoc* Jakarta agar mendorong komunitas internasional mendukung didirikannya pengadilan internasional bagi Timor Lorosa'e. Masyarakat Timor Lorosa'e terus aktif menuntut suatu pengadilan internasional, dan ini harus didukung pemerintah Timor Lorosa'e dan kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional guna mendorong komunitas pemerintah internasional untuk memberikan keadilan. ❖

Editorial: Kemerdekaan dan Kekebalan Hukum (sambungan dari halaman 20)

mencakup warganegara Timor Lorosa'e atau warganegara mana saja yang bekerja bagi pemerintah AS atau sebagai kontraktornya (seperti Internews, Asia Foundation atau DynCorp, Lihat *Buletin La'o Hamutuk*, Vol. 3 No. 2-3, halaman 8).

Banyak negara menolak menandatangani kesepakatan serupa, sementara yang lainnya masih mengulur-ulur waktu. Hanya Israel dan Romania yang telah menandatangani sebelum Timor Lorosa'e. Israel secara ilegal menduduki wilayah lain, dan Romania mengeksekusi tanpa melalui pengadilan diktatornya yang digulingkan bersama dengan istrinya 13 tahun silam. Dalam jangka waktu sebulan setelah Timor Lorosa'e menanda-tanganinya, sembilan negara lainnya (Tajikistan, Republik Dominika, Uzbekistan, Kepulauan Marshall, Palau, Mauritania, Honduras, Micronesia, dan Afghanistan) juga menanda-tanganinya, walaupun kebanyakan dari negara-negara ini membutuhkan ratifikasi sebelum kesepakatan tersebut berlaku. Negara-negara ini tergantung pada bantuan militer dan dukungan ekonomi AS; sebagian besar sedikit pengalamannya dengan keadilan yang sejati; sebagian besar negara-negara yang kecil dan lemah.

Dalam kasus Timor Lorosa'e, aksi AS tersebut sangat keterlaluan. Negeri ini bahkan belum mempunyai waktu yang cukup untuk mengembangkan sistem hukumnya, menyusun hukum pidananya, mengembangkan keterampilan dan hubungan diplomatiknya. Apakah memberikan kekebalan hukum kepada tentara AS merupakan prioritas yang lebih tinggi bagi Timor Lorosa'e daripada menulis undang-undang yang mengatur bagaimana pemerintah kita dijalankan?

Jika Parlemen meratifikasi kesepakatan kekebalan hukum dengan AS, Parlemen melanggar hukum Timor Lorosa'e. Kesepakatan ini bertentangan langsung dengan maksud dan tujuan Statuta Roma, satu perjanjian yang sekarang menjadi bagian penting dari sistem hukum Timor Lorosa'e. Menurut Pasal 9 Konstitusi Timor Lorosa'e, "semua peraturan yang bertentangan dengan ketentuan konvensi-konvensi, perjanjian-perjanjian, dan kesepakatan-kesepakatan internasional yang diberlakukan dalam sistem hukum Timor Lorosa'e dinyatakan tidak berlaku."

Rangkaian kata dari persetujuan kekebalan hukum tersebut menyatakan bahwa AS akan mengadili "bilamana dipandang pantas," yang keputusannya tergantung pada AS; lagi pula, beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan menurut Statuta Roma bukan merupakan kejahatan menurut hukum AS. Terobosan-terobosan ini melanggar tujuan dasar Statuta Roma: bahwa MKI dapat mengadili apabila pemerintah tidak mau atau tidak dapat melaksanakannya. Statuta Roma juga memberikan wewenang kepada MKI, bukan pemerintah nasional, untuk memutuskan siapa yang ditangkap dan diminta memberikan keterangan.

AS mengklaim bahwa kesepakatan kekebalan hukum ini tercantum dalam Pasal 98(2) Statuta Roma, yang ditulis guna menyelesaikan konflik antara MKI yang baru dan perjanjian-perjanjian mengenai ekstradisi yang telah ada dan Kesepakatan Status Pasukan (SOFA, Status of Forces Agreement). Kesepakatan Status Pasukan merupakan suatu perjanjian bilateral yang mendefinisikan bagaimana dan di mana kejahatan yang dilakukan di dalam suatu negeri oleh tentara dari negara lain akan diadili. Amerika Serikat telah menandatangani Kesepakatan Status Pasukan dengan lebih dari 100 negara.

Pada saat kesepakatan kekebalan hukum ditandatangani di bulan Agustus, Timor Lorosa'e belum menandatangani suatu SOFA atau kesepakatan ekstradisi. Oleh karena itu, Pasal 98 tidak relevan untuk kita, dan kesepakatan kekebalan hukum tersebut ilegal. Jika Timor Lorosa'e meratifikasi kesepakatan kekebalan hukum ini, kita akan mengalami kesulitan yang lebih banyak dalam merundingkan perjanjian ekstradisi dan perjanjian SOFA, karena kita telah menyerahkan (kepada AS) sejumlah wewenang yang biasanya terkandung di dalam perjanjian-perjanjian seperti ini.

MKI hanya memiliki yurisdiksi atas "kejahatan-kejahatan paling berat yang menjadi keprihatinan internasional" (genosida, kejahatan terhadap umat manusia, dan kejahatan perang), yang kelihatannya tidak mungkin diulangi di Timor Lorosa'e. Tetapi tekanan yang diberikan oleh AS terhadap Timor Lorosa'e mengenai masalah ideologis secara khusus mencemaskan karena kedua negara secara bersamaan tengah merundingkan SOFA yang menyebutkan bagaimana personil AS yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak sistematis atau kejahatan perorangan lainnya (seperti pemerkosaan, pembunuhan, penyerangan, dan perampokan) di Timor Lorosa'e akan diadili. Tentara AS yang melakukan kejahatan serupa di Jepang, Korea, Filipina, dan negara lainnya biasanya dipindahkan ke AS, di mana mereka kebanyakan lolos dari pengadilan atau hukuman yang berat. Timor Lorosa'e dan AS menandatangani SOFA pada 1 Oktober tetapi naskah kesepakatan tersebut belum dibuka untuk publik.

Kita berharap bahwa Timor Lorosa'e dapat bertahan menghadapi tekanan AS untuk memberikan kekebalan hukum bagi kejahatan-kejahatan ini, yang lebih mungkin untuk terjadi dibandingkan kejahatan yang dicakup oleh Statuta Roma. SOFA dimaksudkan untuk memberikan tanggungjawab untuk mengadili bukannya memungkinkan kekebalan hukum, tetapi kita memahami bahwa SOFA antara AS dan Timor Lorosa'e dapat mengizinkan penjahat-penjahat AS meloloskan diri dari tanggungjawab. SOFA apapun harus konsisten dengan hukum Timor Lorosa'e (termasuk Statuta Roma) — suatu syarat yang tampak tidak sesuai dengan tuntutan AS. Jika SOFA diusulkan kepada Parlemen untuk diratifikasi, sebagaimana seharusnya, kami mendorong Parlemen untuk mempertimbangkan masalah ini secara hati-hati.

Amerika Serikat telah mengancam memotong bantuan militer dan pelatihan bagi negara-negara yang meratifikasi Statuta Roma dan menolak menandatangani kesepakatan kekebalan hukum. Akan tetapi jika harga dari bantuan tersebut ialah kemerdekaan Timor Lorosa'e dan kemampuan negeri ini untuk mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan kekuasaan hukum yang diajarkan oleh PBB, AS, dan negara-negara lainnya kepada kita selama lebih dari tiga tahun, itu terlalu mahal. Parlemen harus melindungi kemerdekaan Timor Lorosa'e yang diperoleh dengan susah-payah. Tidak ada satu negara pun, khususnya tidak Timor Lorosa'e, harus bergabung dengan konspirasi Amerika Serikat untuk menginjak-injak keadilan internasional.

Timor Lorosa'e bergabung dengan PBB pada 27 September, dan Presiden Xanana Gusmão berpidato di hadapan Majelis Umum di New York. Kepada para delegasi dunia ia berkata: "Timor Lorosa'e tidak akan pernah menjadi tempat pelarian yang aman bagi mereka yang menteror orang sipil tak berdosa, entah atas nama agama, ideologi, atau penyamaran apa pun." Kita berharap Presiden tetap menepati janjinya dan menolak menanda-tangani kesepakatan kekebalan hukum jika Parlemen menyodorkannya ke mejanya. ❖

Negara paling kuat di dunia nyaris tidak dapat menahan diri untuk memaksakan kehendaknya atas negara yang paling kecil, paling lemah dan paling sedikit pengalamannya. Pada 23 Agustus, Menteri Luar Negeri Pemerintah Timor Lorosa'e yang baru berusia tiga bulan setuju bahwa Timor Lorosa'e dijadikan tempat persinggahan yang aman bagi setiap pejabat Amerika Serikat yang barangkali melakukan kejahatan terhadap umat manusia. Timor Lorosa'e tunduk pada tuntutan Amerika Serikat untuk tidak menyerahkan salah seorang pegawai, pejabat sekarang atau yang lama, atau tentaranya kepada Mahkamah Kejahatan Internasional (MKI) yang baru dibentuk.

Untungnya, Pemerintah di Dili telah memutuskan bahwa persetujuan ini harus diratifikasi oleh Parlemen dan ditandatangani oleh Presiden sebelum diberlakukan. Kami mendesak Parlemen untuk menolak diteruskannya kemerdekaan yang diperoleh dengan susah-payah pada tuntutan AS akan kekebalan hukum.

Tetapi bahkan yang lebih penting, *La'o Hamutuk* bersama dengan banyak warganegara Timor Lorosa'e dan orang-orang lainnya di seluruh dunia menolak dengan tegas kampanye yang dilancarkan oleh AS untuk merongrong keadilan internasional. Saat ini, ketika Presiden Bush berkata kepada masyarakat internasional bahwa AS siap menyerbu Irak tanpa dukungan PBB, kita secara khusus marah karena Washington sedang menuntut agar Timor Lorosa'e memberikan kekebalan hukum sebelumnya kepada para perencana dan pelaksana kebijakan suka-perang yang ilegal dan tidak bermoral.

Pada 1 Juli 2002, Mahkamah Kejahatan Internasional terbentuk, setelah perundingan yang sulit selama bertahun-tahun dan penolakan keras dari Amerika Serikat. Timor Lorosa'e menjadi negara ketiga di Asia yang meratifikasi Statuta Roma yang menjadi dasar pembentukan mahkamah tersebut; hampir 80 negara lainnya juga telah meratifikasi, dan 50 negara telah menandatangani. Statuta Roma adalah perjanjian yang pertama diratifikasi oleh negara baru ini, suatu pernyataan yang jelas bahwa Timor Lorosa'e mendukung prinsip fundamental MKI: bahwa tak seorang pun berada di atas hukum.

Mengingat bahwa pengalaman Timor Lorosa'e selama seperempat abad menjadi korban dari kejahatan terhadap umat manusia, dan frustrasi rakyat kita pada kegagalan Indonesia dan komunitas internasional untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku, kita tak dapat mengharapkan yang lebih rendah. Meskipun MKI tidak dapat mengadili kejahatan yang terjadi sebelum Juli 2002, didirikannya MKI serta partisipasi Timor Lorosa'e dapat membantu mencegah dan menghukum kejahatan serupa di masa datang.

Amerika Serikat selama bertahun-tahun telah berupaya untuk menghancurkan Mahkamah Kejahatan Internasional. Sepanjang perundingan-perundingan yang mengarah pada Statuta Roma, para juru runding membuat konsesi-konsesi dengan Amerika Serikat, yang melemahkan kekuatan mahkamah tersebut dan kemampuannya untuk menyeret para pelaku. Walaupun Presiden Clinton dengan berat hati menandatangani perjanjian tersebut pada bulan Desember 2000 (sesaat sebelum jabatannya berakhir), Presiden Bush menarik kembali penandatanganan tersebut pada bulan Mei lalu, dan telah berjanji bahwa AS akan sedapat mungkin berusaha menghindarkan warganegara Amerika dihadapkan ke mahkamah pengadilan tersebut.

Taktik AS yang pertama ialah menghalangi misi penjaga

perdamaian yang di dalamnya terdapat tentara Amerika. Pada bulan Juni lalu, AS memveto kelanjutan Misi Penjagaan Perdamaian PBB di Bosnia dan menarik mundur para pengamat militernya (UNMO) dari Timor Lorosa'e. Pada bulan Juli, Dewan Keamanan PBB meluluskan dan mengadopsi Resolusi 1422. Resolusi ini melarang MKI menyelidiki atau mengadili kasus tertentu yang "melibatkan pejabat atau mantan pejabat atau personel" AS dan negara lainnya yang menolak menandatangani Statuta Roma mengenai kejahatan-kejahatan yang "berhubungan dengan suatu operasi yang dijalankan atau disahkan PBB." Resolusi ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun, tetapi diharapkan untuk diperpanjang. Dalam mengadopsi Resolusi 1422, Dewan Keamanan telah melanggar Piagam PBB sendiri – kekuatan dari Bab VII yang dirancang untuk melawan "ancaman-ancaman terhadap kedamaian dan keamanan internasional" pada saat MKI tidak merupakan ancaman seperti itu.

Taktik AS yang lainnya ialah menekan masing-masing negara dari 100 negara di mana personil tentara AS ditempatkan untuk berjanji bahwa mereka tidak akan pernah mengizinkan pejabat atau pegawai AS yang berada di negara-negara tersebut dikirimkan ke pengadilan tanpa persetujuan AS. Karena AS tidak pernah akan memberikan izin, perjanjian ini menjamin kekebalan hukum bagi personil AS. Dalam kasus Timor Lorosa'e, kesepakatan ini bahkan

(bersambung ke halaman 19)

Apa itu La'o Hamutuk?

La'o Hamutuk (Berjalan Bersama) adalah sebuah organisasi gabungan Timor Lorosa'e-internasional yang memantau, menganalisis, dan melapor tentang kegiatan-kegiatan institusi-institusi internasional utama yang ada di Timor Lorosa'e dalam rangka pembangunan kembali sarana fisik, ekonomi dan sosial negeri ini. *La'o Hamutuk* berkeyakinan bahwa rakyat Timor Lorosa'e harus menjadi pengambil keputusan utama dalam proses rekonstruksi/pembangunan dan bahwa proses ini harus demokratis dan transparan. *La'o Hamutuk* adalah sebuah organisasi independen yang bekerja untuk memfasilitasi partisipasi rakyat Timor Lorosa'e yang efektif dalam rekonstruksi dan pembangunan negeri ini. Selain itu, *La'o Hamutuk* bekerja untuk meningkatkan komunikasi antara komunitas internasional dengan masyarakat Timor Lorosa'e. Staf Timor Lorosa'e dan staf internasional *La'o Hamutuk* mempunyai tanggungjawab yang sama dan memperoleh gaji dan tunjangan yang sama. Terakhir, *La'o Hamutuk* adalah pusat informasi, yang menyediakan berbagai bahan bacaan tentang model-model, pengalaman-pengalaman, dan praktek-praktek pembangunan, serta memfasilitasi hubungan solidaritas antara kelompok-kelompok di Timor Lorosa'e dengan kelompok-kelompok di luar negeri dengan tujuan untuk menciptakan model-model pembangunan alternatif.

Dalam semangat mengembangkan transparansi, La'o Hamutuk mengharapkan Anda menghubungi kami jika anda mempunyai dokumen dan/atau informasi yang harus mendapat perhatian rakyat Timor Lorosa'e dan komunitas internasional.